MODUL
TEMA 12

Dinamisnya Kehidupan Bangsaku

SEJARAH INDONESIA PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2021

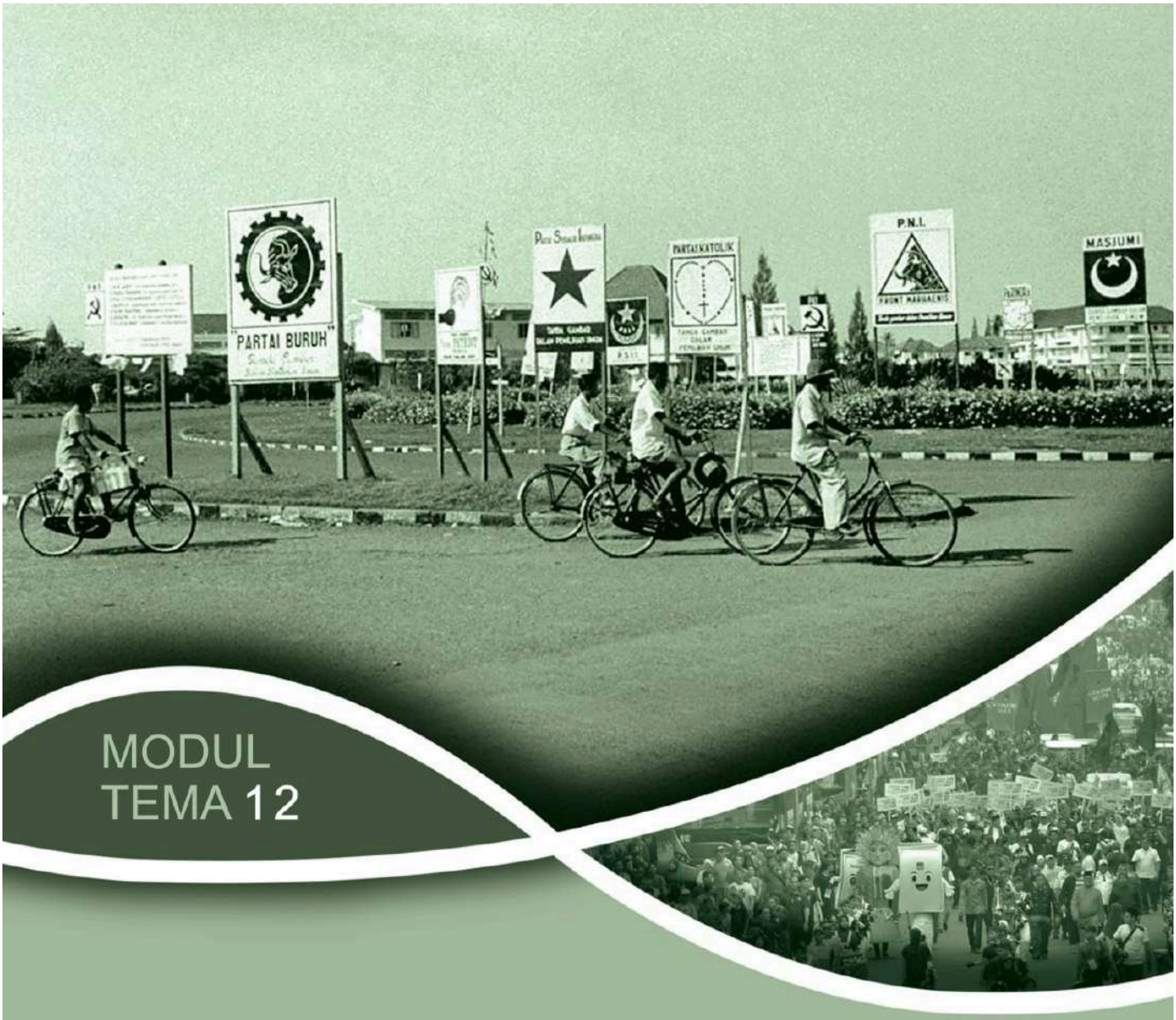

MODUL
TEMA 12

Dinamisnya Kehidupan Bangsaku

SEJARAH INDONESIA PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2021

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Sejarah Indonesia Paket C Setara SMA/MA Kelas XII
Modul Tema 12 : Dinamisnya Kehidupan Bangsaku

- **Penulis** : Fauzi Eko Pranyono
- **Editor** : Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
  Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 60 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Edisi Revisi Tahun 2021

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar serta didesain sesuai kurikulum 2013. Selain itu modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv

MODUL 12 DINAMISNYA KEHIDUPAN BANGSAKU 1
Petunjuk Penggunaan Modul 1
Tujuan Mempelajari Modul 2
Pengantar Modul 2

Unit 1 POLITIK EKONOMI NEGARA BELIA 3
A. Dinamika Politik Negara Muda 4
Penugasan 1.1 9
Penugasan 1.2 13
Penugasan 1.3 15
B. Kondisi Ekonomi Negara Muda 16
Penugasan 1.4 22
Latihan Soal Unit 1 23

UNIT 2 POLITIK EKONOMI ORDE BARU SAMPAI ERA REFORMASI 26
A. Politik Masa Orde Baru 27
Penugasan 2.1 32
B. Politik Masa Reformasi 33
Penugasan 2.2 37
C. Ekonomi Masa Orde Baru 38
Penugasan 2.3 40
D. Ekonomi Masa Reformasi 41
Penugasan 2.4 45
Latihan Soal Unit 2 46

Rangkuman 49
Kunci Jawaban 50
Penilaian 52
Kriteria Pindah / Lulus Modul 58
Daftar Pustaka 59
Tentang Penulis 60

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada mayarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip *flexible learning* sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular di mana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang disajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A), sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020
Plt. Direktur Jenderal

Hamid Muhammad

Tujuan Mempelajari Modul

Setelah mempelajari modul ini, Anda mampu:

1. Menjelaskan perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal.
2. Menganalisis terbentuknya pemerintahan demokrasi terpimpin.
3. Mendeskripsikan sistem pemerintahan dan politik pada masa demokrasi terpimpin
4. Menjelaskan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.
5. Menyajikan laporan tertulis hasil analisis tentang bentuk penyimpangan dalam sistem pemerintahan dan konsep politik Indonesia yang diakibatkan Dekrit 5 Juli 1959.

Pengantar Modul

"*Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah*". Itu pidato terakhir yang disampaikan Bung Karno pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 1966. Meskipun kalimat tersebut sangat sederhana, namun jika kita kaji secara mendalam, makna dari ungkapan tersebut selalu mengingatkan kita bahwa sejarah itu ada, sejarah itu harus diingat, dan sejarah itu harus kita jadikan kajian untuk mawas diri. Sehingga dengan mempelajari sejarah, kita tidak sekedar mengingat peristiwa, tetapi yang lebih penting dari belajar sejarah adalah sebagai pengalaman yang harus diimplementasikan agar peristiwa buruk dan menyakitkan tidak terulang sedangkan peristiwa indah dan menyenangkan akan kita kembangkan.

Demikian pula perjalanan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia, mulai semenjak merdeka pada 17 Agustus 1945 hingga saat ini. Ada kenangan manis, ada pula pengalaman pahit. Dan anehnya, kenangan pahit pun sering terulang dalam kehidupan politik bangsa kita. Sebagai contoh, pada masa Orde Lama muncul banyak partai politik dalam pemilu, ternyata pada masa Reformasi jumlah partai yang banyak itu terulang kembali. Jadi, kapan kita akan belajar dari sejarah masa lalu?

Modul 12, Dinamisnya Kehidupan Bangsaku ini akan membantu Anda untuk menganalisis kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan hingga era reformasi sekarang. Liku-liku, pasang surut, naik turunnya kondisi politik dan ekonomi bangsa merupakan bunga rampai dari berjalannya suatu negara menuju cita-cita, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Usulan Komite Nasional tersebut mendapat sambutan dari pemerintah yang segera mengeluarkan maklumat wakil presiden No. X, yang isinya sesuai dengan usulan KNIP. Setelah BPKNIP terbentuk, kegiatan pertama yang dilakukannya adalah mengajukan usulan kepada pemerintah untuk segera membentuk partai-partai politik. Usul tersebut dilakukan melalui pengumuman BPKNIP Nomor 3 tanggal 30 Oktober 1945, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

a. BPKNIP menganggap roda pemerintahan telah berputar maka telah tiba saatnya untuk mengusahakan pengertian rakyat.
b. BPKNIP menolak pembentukan partai politik tunggal.

Usulan BPKNIP diterima oleh pemerintah yang kemudian mengeluarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang isinya adalah:

a. Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, karena akan membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat.
b. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.

Setelah Maklumat Pemerintah disampaikan, lahirlah partai-partai politik baru antara lain; Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Buruh Indonesia (PBI) Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Katolik, Partai Kristen dan Partai Sosialis.

2. Pembagian Wilayah Republik Indonesia

Hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, tentang pembentukan kabinet dan pembagian wilayah Indonesia, direalisasikan pada 2 September 1945. Panitia kecil yang terdiri dari Mr. Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodimedjo, membentuk departemen dan membagi wilayah Indonesia atas 8 provinsi serta gubernurnya. Pembentukan kabinet terdiri dari 12 kementerian. Kabinet tersebut merupakan kabinet presidensil yang bertanggung jawab kepada presiden dan anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugas kabinet adalah membantu presiden menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Sedangkan pembagian wilayah Indonesia atas 8 provinsi dan gubernurnya, adalah sebagai berikut.

Tabel: Pembagian Wilayah Provinsi dan Gubernur di Indonesia

No	Provinsi	Gubernur	No	Provinsi	Gubernur
1	Sumatera	Teuku Mohammad Hasan	5	Nusa Tenggara	I Gusti Ketut Pudja
2	Jawa Barat	Sutardjo Kartohadikusumo	6	Maluku	Mr.J. Latuharhary
3	Jawa Tengah	R. Pandji Suroso	7	Sulawesi	Dr. G.S.S.J. Ratulangi
4	Jawa Timur	R.M. Surjo	8	Kalimantan	Ir. Pangeran Moh. Noor

a. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
b. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
c. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.

Pada Minggu, 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidangnya yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata, menghasilkan dua keputusan, yaitu:

a. Pembagian wilayah yang terdiri atas 8 (delapan) provinsi beserta calon gubernurnya.
b. Pembentukan Komite Nasional Daerah.

Rapat PPKI dilanjutkan pada 22 Agustus 1945 yang berlokasi di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa. Pada rapat yang yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ini menghasilkan keputusan sebagai berikut:

a. Komite Nasional Indonesia (KNI) adalah badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah.
b. Partai Nasional Indonesia (PNI) dirancang sebagai partai tunggal RI.
c. Badan Keamanan Rakyat (BKR) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

Pada 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan hasil sidang PPKI tersebut, tetapi keputusan yang menyangkut ketetapan kedua, yaitu PNI sebagai satu-satunya partai politik, tidak jadi diberlakukan.

Setelah membentuk KNI pada 18 Agustus 1945, PPKI kembali membentuk KNIP pada 22 Agustus 1945 yang berpusat di Jakarta. Badan yang diketuai oleh Mr.Kasman Singodimedjo ini diumumkan pada 25 Agustus 1945 dan dilantik pada 29 Agustus 1945. Pada tingkat daerah dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang berada di seluruh provinsi di Indonesia dan badan ini berkembang sebagai badan legislatif.

Pada tanggal 16 Oktober 1945 KNIP menyelenggarakan sidangnya yang pertama. Hasil sidang tersebut adalah:

a. Membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang beranggota 15 orang.
b. Mengusulkan kepada Presiden supaya KNIP diberi kekuasaan Legislatif selama MPR/DPR belum terbentuk.

UNIT 1 POLITIK EKONOMI NEGARA BELIA

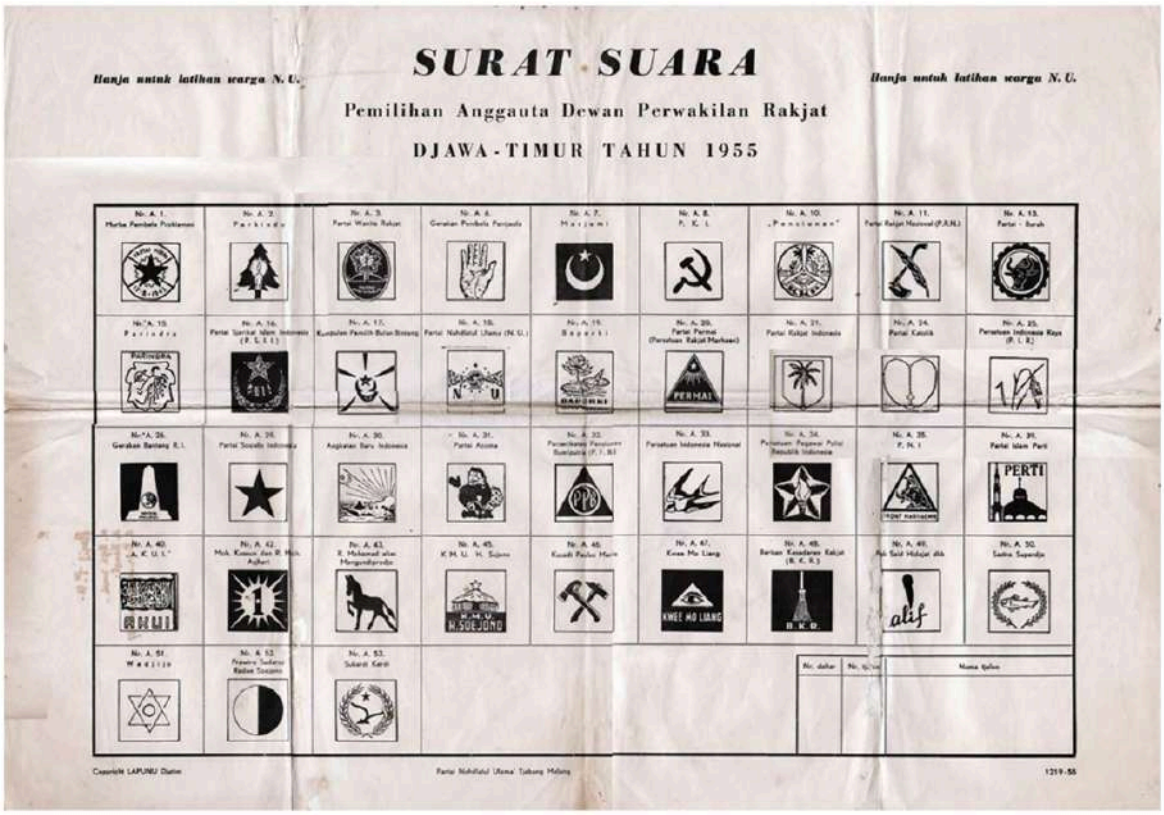

Gambar Partai Peserta Pemilu Tahun 1955
Sumber: https://google.com

Amati dan cermati gambar kartu suara pemilu di atas! Gambar tersebut adalah kartu suara dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) Indonesia pertama kali yang dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilihan umum 1955 ini dianggap sebagai pemilu paling bersejarah karena Pemilu 1955 ini adalah Pemilu pertama Indonesia. Setelah sepuluh tahun Indonesia merdeka baru dilaksanakan pemilu. Perhatikanlah partai-partai yang ikut dalam pemilu. Coba hitung, ada berapa banyak, kontestan peserta pemilu saat itu? Pelaksanaan Pemilu 1955 tidak terlepas dari dinamika politik dan ekonomi awal kemerdekaan, dimana bangsa Indonesia masih tergolong sangat muda yang masih mempunyai banyak permasalahan di bidang politik.

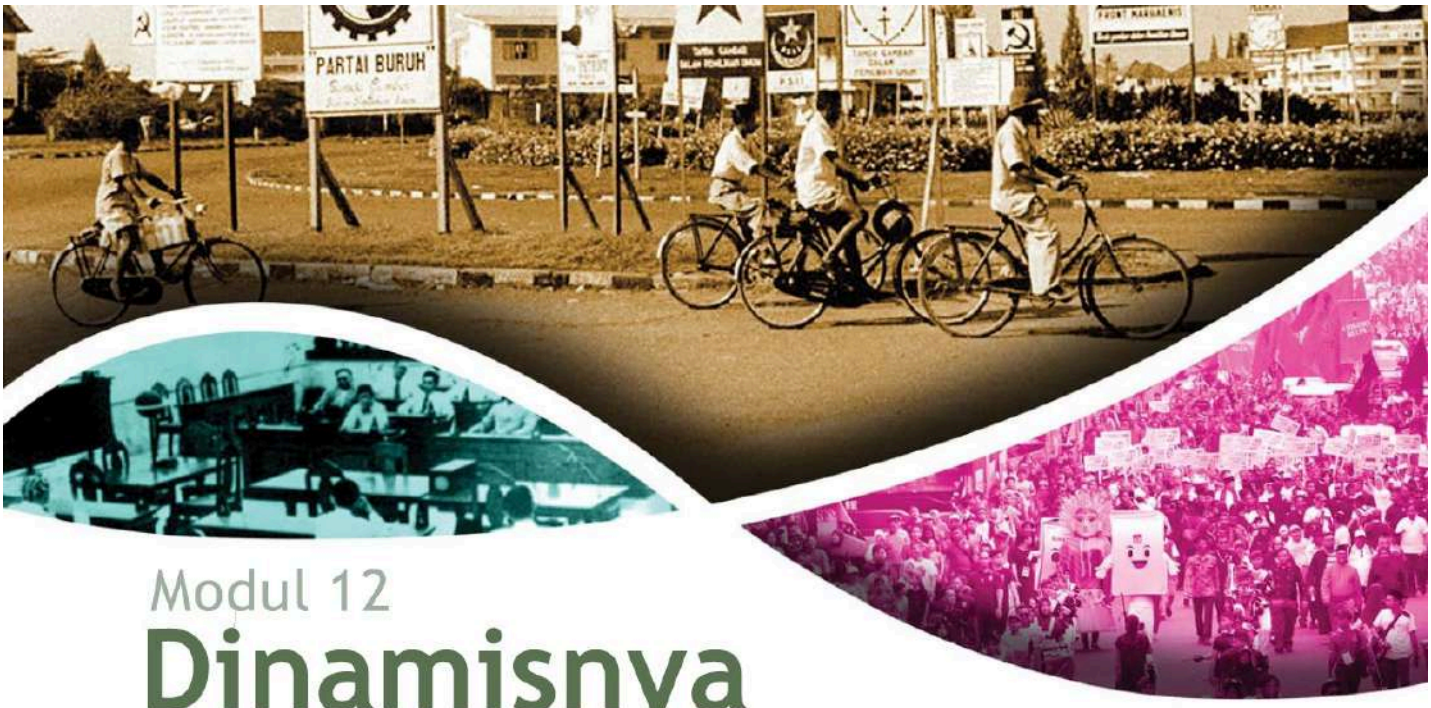

Modul 12

Dinamisnya Kehidupan bangsaku

Petunjuk Penggunaan Modul

Sebelum mempelajari modul ini, bacalah petunjuk penggunaan berikut ini!

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang akan diperoleh setelah mempelajari materi ini.
2. Modul ini memuat informasi tentang apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan antara pembelajaran.
3. Pelajari dengan seksama materi tiap kegiatan belajar
4. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya berkonsultasi pada tutor.
5. Kerjakan tugas dan/atau latihan yang terdapat pada akhir unit, diskusikan dengan teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar.
6. Kerjakan soal-soal penilaian tanpa melihat kunci jawaban
7. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui skor penilaian Anda
8. Jika perolehan skor Anda minimal 75% maka Anda dinyatakan telah menguasai kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan ke modul berikutnya.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Untuk mengelola bangsa yang besar itu tidak mudah. Sejak awal kemerdekaan Bangsa Indonesia sudah mengalami berbagai macam konflik dan pergolakan. Untuk menjadi bangsa besar nampaknya harus melalui berbagai cobaan dan rintangan. Terutama masalah politik serta pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Perkembangan politik dan ekonomi sejak awal kemerdekaan hingga sekarang sangat menentukan perjalanan bangsa Indonesia di masa mendatang, oleh karena itu kita harus mengetahui sejarah perjalanan politik dan ekonomi bangsa Indonesia. Dari sejarah masa lalu, kita akan belajar, mana yang baik dan mana yang layak kita tinggalkan. Tidak selamanya perjalanan itu mulus, namun rintangan justru akan menambah pengalaman hidup berbangsa, untuk lebih memperkokoh kejayaan bangsa.

Saat ini bangsa kita sudah menikmati era reformasi. Era reformasi yang dihadapi saat ini akan menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari masa lampau. Karena itu kita perlu mempelajari dinamika kehidupan politik dan ekonomi bangsa sejak awal kemerdekaan hingga masa sekarang.

Marilah kita mulai dengan pembahasan keadaan politik Indonesia sebagai negara muda, yaitu pada awal kemerdekaan sampai masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya kita bahas bersama keadaan ekonomi pada masa tersebut.

A. Dinamika Politik Negara Muda

1. Peran PPKI di Awal Kemerdekaan

Ketika Republik Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, negara belum memiliki lembaga tertinggi dan tinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ataupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan yang dikehendaki adalah presidensial, namun dua bulan setelah penetapan UUD 1945 sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Maka setelah proklamasi dikumandangkan, esok harinya yaitu 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk pertama kalinya yang menjadi kelanjutan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 10 – 16 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hasil sidang ini adalah:

Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945
Sumber: https://www.ilmusiana.com

Dalam perjalanannya, sistem Presidensiil berubah menjadi sistem Parlementer, dimana presiden bertanggungjawab kepada parlemen. Pada saat itu sebagai parlemen adalah KNIP. Sistem Parlementer ditandai dengan terbentuknya kabinet dibawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir, dilanjutkan Amir Syarifuddin, dan Mohammad Hatta.

Berikut adalah para menteri pada kabinet Indonesia yang pertama.

No	Kementerian	Nama Menteri
1	MenteriLuar Negeri	Mr. Achmad Subardjo
2	Menteri Dalam Negeri	R.A.A Wiranatakoesoema
3	Menteri Keamanan Rakyat	Soeprijadi(gugur), digantikan Soeljadikoesoemo
4	Menteri Kehakiman	Prof. Dr. Soepomo
5	Menteri Penerangan	Amir Sjarifuddin
6	Menteri Keuangan	Dr. Samsi Sastrawidagda
7	Menteri Kemakmuran	Ir. Soerachman Tjokroadisoeryo
8	Menteri Perhubungan	Abikoesno Tjokrosoejoso
9	Menteri Pekerjaan Umum	Abikoesno Tjokrosoejoso
10	Menteri Sosial	Iwa Koesoemasoemantri
11	Menteri Pengajaran	Ki Hajar Dewantara
12	Menteri Kesehatan	Dr. Boentaran Martoatmodjo
13	Menteri Negara	Mohammad Amir, Wahid Hasjim, Mr.Sartono, A.A.Maramis, Otto Iskandarninata (5 orang)

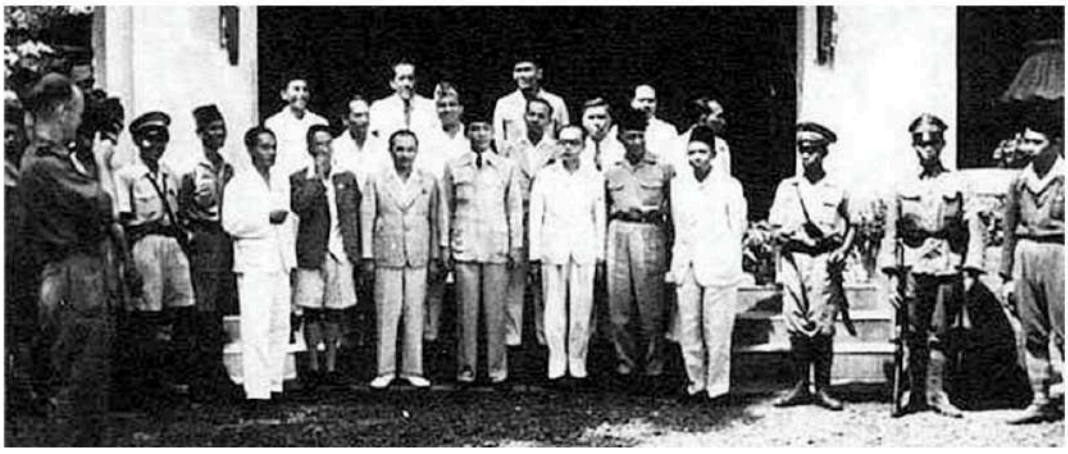

Foto Kabinet Pertama Indonesia
Sumber:https://www.kompasiana.com

4. Pembentukan Badan-Badan Perjuangan

Sebagai realisasi Keputusan PPKI tanggal 22 Agustus 1945, Presiden menganjurkan para pemuda yang dahulunya pernah tergabung dalam anggota Heiho, Peta, Seinendan, Keibodan, dan KNIL untuk segera bergabung dan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) baik ditingkat pusat maupun daerah. Pembentukan BKR ternyata tidak semudah

PENUGASAN 1.2

KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL

Pada masa Demokrasi Liberal, kabinet mengalami dinamika karena masalah politik. Pada masa ini parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar, sehingga sewenang-wenang menentukan kabinet berdasarkan kepentingan partainya. Akibatnya muncul ketidakpercayaan bahkan tidak senang dengan kabinet yang terbentuk.

- Tujuan yang diharapkan:

  Dengan penyelesaian tugas ini Anda mampu:
  1. Menjelaskan dinamika kabinet di masa demokrasi liberal yaitu kurun waktu September 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.
  2. Menjelaskan program masing-masing kabinet di masa demokrasi liberal.

- Media yang dibutuhkan:
  Alat tulis, kertas

- Langkah-langkah:
  1. Carilah sumber buku atau tulisan di internet mengenai dinamika kabinet di masa demokrasi liberal yaitu kurun waktu September 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.
  2. Uraikan informasi sekitar tujuh kabinet di masa liberal, yaitu pimpinan kabinet dan masing-masing program serta dinamika politik yang terjadi di masa kepemimpinan kabinet masing-masing.
  3. Pada akhir masa demokrasi liberal yaitu Kabinet Djuanda disebut juga sebagai Kabinet Zaken. Apa arti dari Kabinet Zaken? Apa bedanya dengan kabinet sebelumnya?
  4. Tulis tugas dan dikumpulkan pada akhir pembelajaran modul.

8. Politik di Masa Demokrasi Terpimpin

Masa demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan diakhiri dengan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966. Dikeluarkannya Dekrit Presiden karena adanya kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-undang. Adapun isi dari Dekrit Presiden adalah pembubaran Badan Konstituante, UUD 1945 kembali digunakan sebagai undang-undang dasar negara, dan pembentukan MPRS

yang diharapkan. Banyak tokoh pemuda yang telah membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri yang lepas dari BKR antara lain adalah Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Banteng (BB), Hizbullah, Sabilillah, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).

5. Politik Multi Partai

Hasil keputusan BPKNIP menolak pembentukan partai politik tunggal di Republik Indonesia. Usulan BPKNIP kepada pemerintah adalah membentuk partai-partai politik. Usulan tersebut diterima oleh pemerintah dengan dikeluarkannya maklumat tentang pendirian partai-partai politik. Tujuannya adalah untuk mewadahi semua aliran atau paham yang ada di masyarakat dan ikut serta dalam pemilihan umum.

Setelah disampaikan maklumat tersebut, mulailah bermunculan partai-partai politik dari berbagai paham dan golongan. Mereka berlomba untuk bisa ikut pemilu. Namun di balik pendirian partai politik, masing-masing punya tujuan yang berbeda. Maka ramailah Republik Indonesia ini dengan aneka ragam partai beserta atributnya yang warna-warni. Pada pemilu 1955 tercatat ada 172 partai politik peserta pemilu. Coba Anda bayangkan, jika partai sebanyak itu ada pada saat sekarang, berapa lama penghitungan suara akan selesai.

Sistem politik multi partai ternyata tidak menciptakan tatanan politik yang demokratis seperti yang diharapkan. Banyaknya jumlah partai tidak membantu penyelesaian masalah negara. Kenyataan yang terjadi adalah meningkatnya perebutan kepentingan golongan dari partai-partai politik. Pembentukan partai politik dimanfaatkan oleh politisi sebagai ajang perebutan kursi atau jabatan.

PENUGASAN 1.1

KABINET PARLEMENTER AWAL KEMERDEKAAN

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kabinet yang semula menganut sistem presidensiil berubah menjadi sistem parlementer. Pada masa ini, kabinet sering berganti pimpinan dan menteri. Tentu dengan sering bergantinya kabinet akan membawa dampak yang kurang baik. Jelaskanlah terkait dengan hasil dan dampak, kelebihan serta kekurangan dari berbagai kabinet parlementer yang terbentuk pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

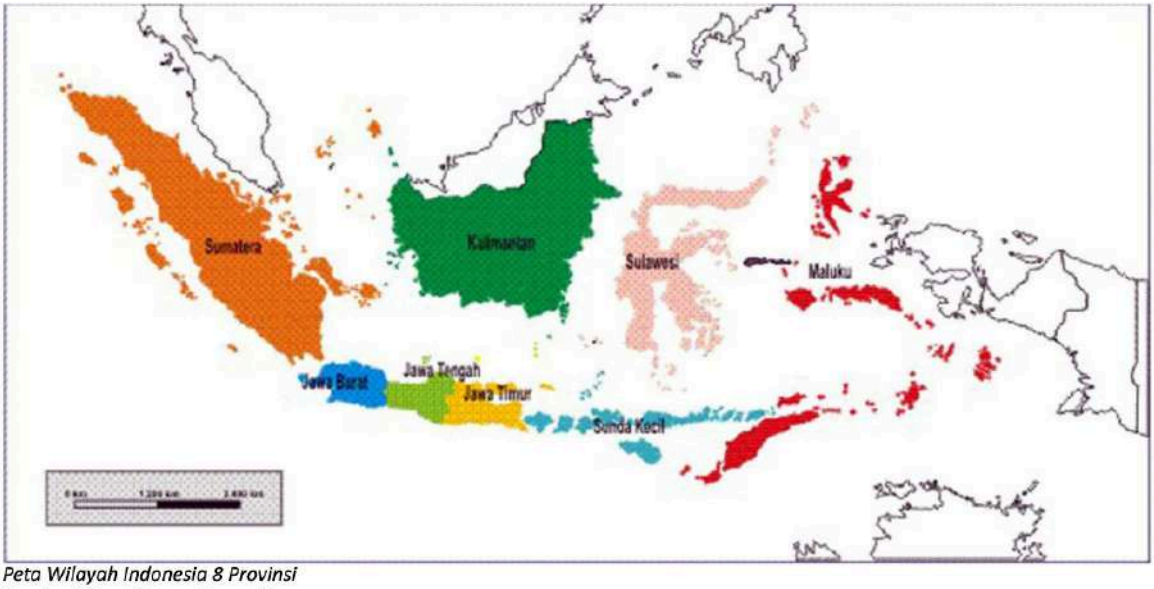

Peta Wilayah Indonesia 8 Provinsi
Sumber:https://www.risamediaa.com

Perlu diketahui bahwa pada awal masa kemerdekaan, wilayah Papua (Irian Jaya) belum masuk dalam wilayah Indonesia.

3. Kabinet Pertama Republik Indonesia

Sistem pemerintahan awal kemerdekaan adalah sistem presidensiil, yaitu kabinet dibentuk dan bertanggungjawab kepada presiden. Kedudukan presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden Soekarno ketika itu membentuk kabinet dalam rangka memenuhi kelengkapan alat negara. Namun kondisi pada saat itu keadaan dan situasi sungguh sulit serta tidak memungkinkan membentuk kabinet secara leluasa. Keadaan Indonesia di awal kemerdekaan masih carut marut. Kondisi ekonomi belum menentu. Ditambah lagi tokoh-tokoh kemerdekaan kita pada saat itu belum punya pengalaman membentuk sebuah negara yang berdaulat. Namun demikian dengan kemauan dan tekad kuat untuk merdeka dan lepas dari cengkraman penjajah, pemerintah pimpinan Soekarno di masa kemerdekaan berusaha membentuk kabinet yang pertama.

Keadaan yang belum menentu tetap tidak menyurutkan langkah Presiden Soekarno melantik kabinet pertamanya pada tanggal 5 September 1945. Kabinet pertama lahir dengan segala keterbatasan. Namun demikian, menteri-menteri yang dipilih itu tidak satupun dari partai politik. Seluruh menteri yang terpilih berasal dari tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Para menteri ini dipilih karena dianggap berjasa dalam ikut serta memerdekakan bangsa. Kabinet ini dibentuk dari semangat kekeluargaan. Hubungan yang terjadi adalah hubungan antara sekelompok sahabat yang sedang berjuang membangun sebuah negara.

- Tujuan yang diharapkan:

  Dengan penyelesaian tugas ini Anda mampu:
  1. Menjelaskan hasil dan sebab berakhirnya kabinet parlementer pimpinan Sutan Syahrir.
  2. Menjelaskan hasil dan sebab berakhirnya kabinet parlementer pimpinan Amir Syarfuddin.
  3. Menjelaskan hasil dan sebab berakhirnya kabinet parlementer pimpinan Mohammad Hatta.
  4. membuat kesimpulan
- Media yang dibutuhkan:
  Alat tulis, kertas
- Langkah-langkah:
  1. Carilah sumber buku atau tulisan di internet mengenai kabinet parlementer di awal kemerdekaan.
  2. Carilah informasi tentang hasil kabinet parlementer pimpinan Sutan Syahrir, dilanjutkan Amir Syarifuddin, dan Mohammad Hatta.
  3. Tulis informasi yang diperoleh dan kumpulkan tugas di akhir kegiatan pembelajaran modul ini.

6. Ideologi dan Partai Politik Pada Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan hanya ada satu partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Tetapi berdasarkan Maklumat Pemerintah Nomor 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai-partai politik dari berbagai faham dan aliran yang ada dalam masyarakat, maka bermunculan partai-partai politik dengan basis ideologinya masing-masing.

Sejak akhir tahun 1945 itulah Indonesia menganut sistem multipartai. Partai-partai yang terdaftar saat itu antara lain sebagai berikut.

No	Partai	No	Partai
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	6	Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI)
2	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)	7	Persatuan Rakyat Marhaen(Permai)
3	Partai Komunis Indonesia (PKI)	8	Partai Rakyat Sosialis (Paras)
4	Partai Buruh Indonesia (PBI)	9	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
5	Partai Rakyat Jelata (PRJ/Murba)	10	Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI)

(MPR Sementara) yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah utusan golongan dan daerah, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) .

Penyampaian Dekrit Presiden
Sumber: https://id.wikipedia.org

Tindak lanjut dari Dekrit Presiden, pada tanggal 10 Juli 1959 pemerintah membentuk sebuah kabinet yang disebut Kabinet Karya. Kabinet Karya dipimpin langsung oleh Presiden. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kabinet parlementer berganti dengan sistem kabinet presidensial, sedangkan sistem demokrasi liberal diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.

Kebijakan politik yang diambil pada masa demokrasi terpimpin, antara lain sebagai berikut:

a. Pembentukan DPR
   Berdasarkan Penetapan Presiden No.1 Tahun 1959 yang dikeluarkan pada tanggal 15 juli 1959 menyatakan bahwa sebelum terbentuk DPR menurut UUD 1945, maka DPR hasil pemilu tahun 1955 atas dasar UU No. 7 Tahun 1953 tetap menjalankan tugasnya.

b. Pembentukan MPRS
   Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, lembaga tertinggi negara harus dibentuk adalah MPR. Namun, berhubung belum melaksanakan Pemilu maka MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Ketua MPRS adalah Chaerul Saleh.

c. Pembentukan DPAS.
   Berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

d. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas)
   Pada bulan Agustus 1959, dibentuk Dewan Perencanaan Nasional yang diketuai oleh Muh. Yamin. Pada tahun 1963, Depernas (Dewan Perencanaan Nasional) diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas) yang dipimpin langsung oleh presiden sendiri.

7. Politik di Masa Demokrasi Liberal

Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong lahirnya partai-partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multi partai. Pada masa demokrasi liberal ini, partai politik menjamur. Tercatat jumlah partai yang ikut pemilu 1955 ada sebanyak 172 partai politik.

Konsekuensi dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan sistem multi partai, maka partai-partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen. Demokrasi Liberal sering disebut Demokrasi Parlementer, kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen. Akibatnya, kabinet sering berganti. Usia kabinet yang pendek menyebabkan program kabinet tidak bisa berjalan optimal.

Kekacauan politik pada masa demokrasi liberal ini terjadi karena parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar, sehingga sewenang-wenang menentukan kabinet berdasarkan kepentingan partainya. Padahal parlemen sendiri terdiri dari berbagai golongan dengan ideologi yang berbeda. Tentu saja hal ini berpengaruh pada aspirasi golongan yang berbeda-beda. Akibatnya sering terjadi ketidakpercayaan bahkan tidak senang dengan kabinet yang terbentuk. Hal ini tentu akan menyebabkan kabinet sering diganti oleh parlemen.

Pada kurun waktu tahun 1950 – 1959, PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR. PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Adapun susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan pada masa demokrasi liberal, adalah seperti pada tabel berikut:

No	Nama Kabinet	Masa Kepemimpinan
1	Kabinet Natsir	6 September 1950–21Maret 1951
2	Kabinet Soekiman	27 April 1951–3 April 1952
3	Kabinet Wilopo	3 April 1952–3 Juni 1953
4	Kabinet Ali II	31 Juli 1954–24 Juli 1955
5	Kabinet Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955–3 Maret 1956
6	Kabinet Ali Sastramojoyo II	20 Maret 1956–4 Maret 1957
7	Kabinet Djuanda	9 April 1957–5 Juli 1959

Partai-partai tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan ideologinya, yaitu:

a. Ideologi Bersifat Nasionalisme

Partai yang mendasarkan ideologinya bersifat nasionalis adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Dasar perjuangan partai nasionalis adalah faktor kemanusiaan, yang mengutamakan tercapainya kesatuan bangsa. Tujuan dari partai beridelogi nasionalis adalah mengutamakan terwujudnya kebebasan nasional. Menurut penganut nasionalis ini, kebebasan nasional merupakan pintu gerbang menuju kemakmuran suatu bangsa. Aliran ini menganggap penting untuk melakukan hubungan dengan luar negeri untuk mendapatkan dukungan dunia internasional. Tugas pemerintah adalah membentuk suatu komunitas bangsa yang bebas dari dominasi dan tekanan bangsa asing baik dalam politik, ekonomi, maupun budaya.

b. Ideologi Bersifat Agama

Dasar dari partai yang ideologinya bersifat agama adalah perjuangan yang dilakukan mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada agama bersangkutan. Partai yang berideologi keagamaan pada saat itu diantaranya:

1) Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama yang beraliran Islam;
2) Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) yang beraliran agama Katolik;
3) Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang beraliran agama Kristen.

c. Ideologi Bersifat Sosialis-Komunis

Dasar perjuangan partai yang berideologi sosialis-komunis adalah internasionalisme atas kemanusiaan. Mereka menjunjung tinggi doktrin komunisme. Partai berideologi komunisme terbesar di Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Sementara itu yang beraliran sosialis adalah Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI) dan Partai Rakyat Sosialis (Paras). Sejak awal kemerdekaan partai ini berkembang dengan pesat, terbukti pada saat Pemilu 1955 termasuk dalam 4 besar partai yang meraih suara terbanyak.

Kemunculan banyak partai tersebut dapat terasa langsung bagi KNIP. perwakilan partai tersebut duduk dalam badan pekerja KNIP. Melalui sistem multi partai ini menunjukkan bahwa antusiasme dan kesadaran berpolitik rakyat Indonesia saat itu sangat baik sehingga mereka menunjukkan keragaman ideologi yang ada. Keragaman ideologi tercermin dalam hasil Pemilu pertama tahun 1955, dimana 4 partai politik memenangkan suara terbanyak yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

e. Pembentukan Front Nasional

Pada tanggal 31 Desember Tahun 1959, dibentuk Front Nasional yang berfungsi sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan semesta Indonesia.

f. Pembentukan DPR-GR

Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena DPR menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden. Kemudian, Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada 24 Juni 1960.

Demokrasi terpimpin di Indonesia oleh Soekarno dimaksudkan sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yang berbeda dengan sistem demokrasi liberal produk dari barat. Demokrasi terpimpin diharapkan dapat mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan demokrasi liberal. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya demokrasi terpimpin ini mengalami penyimpangan.

PENUGASAN 1.3

Membuat Kliping pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955

- Tujuan yang diharapkan:

  Dengan penusunan kliping pemilu tahun 1955 Anda mampu:

  1. Menyajikan kliping mengenai pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955.
  2. Menyusun tulisan tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 berdasarkan kliping yang disusun.

- Media yang dibutuhkan:

  Alat tulis, kertas

- Langkah-langkah

  1. Mengumpulkan berita yang terkait dengan Pemilu 1955, dihimpun menjadi kliping.
  2. Buatlah uraian tentang berbagai masalah yang terjadi pada Pemilu 1955, dengan cara membuat tabel permasalahan yang terjadi.
  3. Bandingkan dengan kondisi sekarang.
  4. Kumpulkan tugas di akhir kegiatan pembelajaran modul ini.
  5. Carilah sumber dari buku bacaan, internet untuk menambah referensi dalam membuat kliping

Blokade tersebut menyebabkan barang ekspor Indonesia terlambat dikirim, bahkan tidak dapat diekspor sama sekali. Kondisi tersebut menyebabkan barang ekspor Indonesia yang dibumihanguskan. Karena blokade tersebut barang impor yang dibutuhkan tidak dapat masuk sehingga memperburuk kondisi ekonomi dalam negeri. Lebih dari itu inflasi semakin tidak terkendali sehingga rakyat semakin gelisah.

Belanda memiliki tujuan dari blokade tersebut yaitu agar ekonomi Indonesia semakin kacau. Kekacauan ekonomi diharapkan memicu kerusuhan sosial sehingga rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Belanda menjalankan strategi blokade itu untuk menekan Indonesia dengan harapan dapat dikuasai kembali oleh Belanda.

3. Mengatasi Blokade Ekonomi Belanda (NICA)

Ketika Indonesia sebagai negara muda diblokade secara ekonomi, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah dengan segala keterbatasannya melakukan upaya untuk keluar dari blokade ekonomi oleh Belanda. Ada dua upaya mengatasi blokade ekonomi Belanda di awal kemerdekaan, yaitu diplomasi beras ke India dan mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri.

Diplomasi beras ke India pertama dipandang sebagai usaha bersifat politis. Kebetulan India sedang ditimpa bahaya kelaparan. Untuk meringankan beban rakyat India, pemerintah Indonesia bersedia menawarkan kepada India untuk mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Saat itu hasil panen melimpah dan tidak dapat dijual ke luar negeri karena adanya blokade Belanda di pelabuhan dagang. Indonesia mendapatkan imbalan, yaitu pemerintah India bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Pada saat itu Indonesia tidak memikirkan harga karena yang penting adalah dukungan dari negara lain. Keuntungan politis yang diperoleh Indonesia dengan adanya kerjasama dengan India adalah Indonesia mendapatkan dukungan aktif dari India secara diplomatik atas perjuangan Indonesia di forum internasional.

Langkah lain dalam mengatasi blokade ekonomi adalah membuka hubungan dagang secara langsung ke luar negeri yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain; mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (*Isbrantsen Inc*). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Usaha tersebut dirintis oleh suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah yang dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die, yaitu BTC (*Banking and Trading Corporation*) atau Perseroan Bank dan Perdagangan.

PENUGASAN 1.4

Menyusun karya tulis sederhana hasil analisis tentang penyebab kegagalan kebijakan ekonomi Gerakan Benteng

- Tujuan yang diharapkan:

  Dengan menyusun karya tulis tentang kegagalan kebijakan ekonomi Gerakan Benteng, Anda mampu:

  1. Mengidentifikasi kebijakan ekonomi Gerakan Benteng.
  2. Menganalisis kegagalan kebijakan ekonomi Gerakan Benteng.
  3. Menyusun karya tulis sederhana hasil analisis tentang penyebab kegagalan kebijakan ekonomi Gerakan Benteng.

- Media yang dibutuhkan:

  Alat tulis, kertas

- Langkah-langkah

  1. Cari bacaan tentang kebijakan ekonomi Gerakan Benteng.
  2. Carilah referensi dari buku bacaan, internet tentang kebijakan ekonomi Gerakan Banteng.
  3. Lakukan analisis mengapa kebijakan ekonomi Gerakan Benteng gagal?
  4. Buatlah karya tulis sederhana hasil analisis tentang penyebab kegagalan kebijakan ekonomi Gerakan Benteng.

Ekonomi). Badan tersebut dibentuk atas usul dari menteri kemakmuran AK. Gani, yang merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu sepuluh tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Rencana Pembangunan 10 tahun meliputi kebijakan (a) semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara, yang baru terlaksana tahun 1957; (b) bangunan umum vital milik asing dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi, perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap Indonesia; (c) perusahaan modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian antara Republik Indonesia dengan Belanda. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang telah ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan agar Indonesia dapat menggunakan semua cabang produksi secara maksimal dan kuat di mata hukum internasional. Pendanaan untuk Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal asing. Adapun inti rencana ini adalah agar Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan pinjaman baik ke dalam maupun ke luar negeri.

Pada tahun 1948 pemerintah melakukan program Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera). Jumlah prajurit angkatan perang dikurangi secara drastis untuk mengurangi beban Negara. Rasionalisasi yang diusulkan oleh Mohammad Hatta diikuti dengan intensifikasi pertanian, penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan.

Kebijakan ekonomi lainnya adalah Rencana Kasimo (Kasimo Plan). Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) tentang usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Rencana Kasimo tersebut meliputi:

a. Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 ha.
b. Melakukan intensifikasi pertanian di Jawa dengan menanam bibit unggul.
c. Pencegahan penyembelihan hewan yang berperan penting dalam produksi pangan.
d. Membentuk kebun-kebun bibit di desa.
e. Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun.

dan gaji pegawai, jumlahnya mencapai 2,3 milyar. Akibatnya negara Indonesia yang belum memiliki mata uang sendiri harus memakai mata uang Jepang dan Sekutu dengan peredaran jumlah uang yang sangat besar. Maka terjadilah inflasi.

Selain tidak terkendalinya peredaran uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang dan Sekutu, ketersediaan barang di masyarakat menipis bahkan langka. Kelangkaan ini diperburuk adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Dari masalah inflasi ini, kelompok yang paling menderita adalah para petani, sebab pada masa pendudukan Jepang petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah.

Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Untuk mengatasi masalah inflasi tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu hanya memberlakukan 3 mata uang yang digunakan sebagai transaksi di wilayah Republik Indonesia, yaitu:

a. Mata uang De Javasche Bank
b. Mata uang pemerintah Hindia Belanda
c. Mata uang pendudukan Jepang

2. Blokade Ekonomi oleh Belanda

Belanda melakukan Blokade yaitu dengan menutup (memblokir) pintu keluar masuk perdagangan Indonesia terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:

a. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
b. Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
c. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.

Berbagai mata uang diberlakukan pada masa awal kemerdekaan Sumber: google.com)

bawah Kementerian Kemakmuran. Melalui kebijakan tersebut diharapkan pendapatan negara dapat bertambah secara signifikan dengan nasionalisasi pabrik gula dan perkebunan tebu.

Konferensi ekonomi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wakil Presiden Mohammad Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

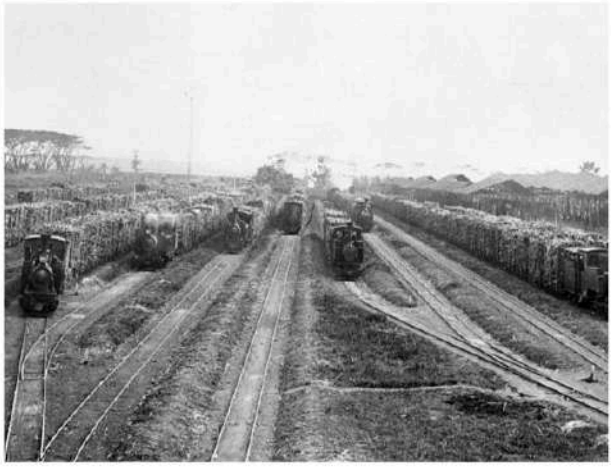

Perkebunan tebu
Sumber: https://mmc.tirto.id/

Kebijakan ekonomi lainnya adalah program pinjaman nasional, yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Untuk mendukung program tersebut maka dibuat Bank Tabungan Pos dan Rumah Gadai (sekarang Pegadaian). Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan, sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah Indonesia. Rakyat dapat meminjam jika rakyat mau menyetor uang ke Bank Tabungan Pos dan pegadaian. Usaha ini mendapat respon rakyat. Hal ini terbukti tabungan masyarakat terkumpul sejumlah Rp. 500.000.000,00. Fakta tersebut menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Indonesia.

https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/

Pada tanggal 19 Januari 1947 pemerintah membentuk *Planning Board* (Badan Perancang

Latihan Soal Unit 1

A. Pilihan Ganda

Kerjakan soal di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang paling benar.

1. Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara pada sidang tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan oleh ....
   a. BPUPKI
   b. PPKI
   c. MPRS
   d. Komite Nasional Indonesia
   e. Soekarno-Hatta
2. Golongan pemuda tidak percaya dengan BPUPKI dan PPKI, karena ...
   a. merupakan bentukan Belanda sehingga dikhawatirkan menjadi antek Belanda.
   b. merupakan bentukan Jepang sehingga dikhawatirkan menjadi antek Jepang.
   c. merupakan bentukan Sekutu sehingga dikhawatirkan menjadi antek Sekutu.
   d. pemuda memiliki wakil dalam kedua lembaga itu tapi tidak bersuara.
   e. pemuda tidak ada yang duduk dalam kedua lembaga itu.
3. Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI menetapkan tiga keputusan, salah satu keputusan yaitu usulan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal di Republik Indonesia akhirnya tidak jadi diberlakukan karena adanya penolakan. Akhirnya pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah Nomor 3 pada 30 Oktober 1945. Isi maklumat itu antara lain....
   a. Pemerintah membentuk partai politik agar sebagai jalan menuju kekuasaan.
   b. Pemerintah menghendaki sistem multipartai agar demokrasi tetap berjalan.
   c. Pemerintah membentuk partai untuk membentuk koalisi.
   d. Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, karena akan membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat.
   e. Pemerintah membentuk banyak partai-partai politik, karena akan membuka jalan bagi semua ideologi yang ada dalam masyarakat.
4. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensiil, namun dalam perkembangannya sistem pemerintahan bergeser pada sistem parlementer. Sistem parlementer ditandai dengan terbentuknya kabinet dibawah pimpinan Perdana Menteri: ...

Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan Indonesia dan akan memuat barang ekspor dari Indonesia dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda. Blokade Belanda di Jawa terlalu kuat, maka jalur kapal diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Usaha menembus blokade ini dibantu oleh Angkatan Laut Indonesia serta pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Perairan di Sumatra yang sangat luas, menyulitkan pihak Belanda melakukan pengawasan secara ketat. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Akhirnya, Indonesia berhasil memperoleh senjata, obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan.

Pemerintah Indonesia pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secara resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Usaha ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

4. Kebijakan Pemerintah Menghadapi Buruknya Kondisi Ekonomi

Sementara itu sejak Februari 1946 pemerintah di tengah keterbatasannya mengeluarkan beberapa kebijakan dalam mengatasi kondisi ekonomi yang buruk. Pada bulan Februari 1946 pemerintah menyelenggarakan Konferensi Ekonomi pertama. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya. Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan. Tercapai kesepakatan bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi.

Hal lain yang disepakati dalam konferensi tersebut adalah masalah pangan disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Sudarsono dibawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. BPPM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog). Tujuannya untuk melarang pengiriman bahan makanan antar karesidenan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di

a. Sutan Syahrir, dilanjutkan Amir Syarifuddin, dan terakhir Hatta.
b. Sutan Syahrir, dilanjutkan Mohamad Natsir, dan terakhir Hatta.
c. Sutan Syahrir, dilanjutkan Wilopo, dan terakhir Hatta.
d. Sutan Syahrir, dilanjutkan Sukiman, dan terakhir Hatta.
e. Sutan Syahrir, dilanjutkan Ki Hajar Dewantara, dan terakhir Hatta.

5. Setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, pemerintahan sistem kabinet parlementer berubah menjadi kabinet presidensiil yang dipimpin langsung Presiden Soekarno, sedangkan sistem demokrasi liberal diganti menjadi ....
   a. demokrasi kerakyatan
   b. demokrasi Indonesia
   c. demokrasi terpimpin
   d. demokrasi Pancasila
   e. demokrasi dan perwakilan
6. Setelah kemerdekaan mata uang yang banyak beredar adalah mata uang pendudukan Jepang, bahkan peredaran mata uang pendudukan Jepang menjadi tidak terkendali. Sementara pemerintah Republik Indonesia belum bisa membuat mata uang sendiri. Karena itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan tiga mata uang sementara yang berlaku, yaitu ....
   a. mata uang Jepang, mata uang De Javasche Bank, dan mata uang pemerintah Hindia Belanda.
   b. mata uang Jepang, mata uang DeJavasche Bank, dan mata uang pemerintah Belanda.
   c. mata uang Jepang, mata uang Sekutu (US dollar), dan mata uang pemerintah Hindia Belanda.
   d. mata uang Jepang, mata uang Sekutu (US dollar), dan mata uang NICA.
   e. mata uang Jepang, mata uang Sekutu (US dollar), dan mata uang KNIL.
7. Tujuan blokade laut Belanda secara ekonomi terhadap Indonesia adalah ....
   a. agar Indonesia dapat berdikari.
   b. tidak berhubungan dengan dunia luar.
   c. agar Indonesia lumpuh.
   d. agar Indonesia tidak bisa import.
   e. agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan.

B. Kondisi Ekonomi Negara Muda

Indonesia merdeka setelah lepas dari penjajahan Jepang dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Kekayaan Indonesia sudah dikeruk oleh penjajah, rakyat dalam keadaan miskin dan menderita. Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dalam negeri yang sumber daya habis dieksploitasi untuk kepentingan perang Jepang. Selain itu, kondisi ekonomi dunia yang tidak kondusif sebagai akibat dampak Perang Dunia II. Tentu hal demikian membuat pemerintah Indonesia yang masih baru, sulit untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Kemiskinan penduduk ada dimana-mana.

Negara Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian. Lebih dari itu sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan. Kondisi politik yang tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, menambah ketidakstabilan ekonomi bangsa Indonesia.

Permasalahan lain yang dihadapi bangsa Indonesia adalah Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional. Untuk mengetahui berbagai permasalahan ekonomi bangsa Indonesia yang masih muda, mari kita pelajari peristiwa berikut.

1. Terjadinya Inflasi yang sangat tinggi

Negara Indonesia yang baru merdeka mengalami inflasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena mata uang Jepang beredar di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali. Saat itu Republik Indonesia belum punya uang sendiri. Pada bulan Agustus 1945 uang Jepang yang beredar di Jawa mencapai 1,6 milyar, sedangkan secara umum yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar. Bersamaan dengan itu, pasukan Sekutu mengeluarkan mata uang cadangan dari bank-bank yang berhasil dikuasai untuk biaya operasional

Berbagai mata uang diberlakukan pada masa awal kemerdekaan
Sumber: google.com)

A. Politik Masa Orde Baru

Orde baru merupakan masa pemerintahan sejak diterbitkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) hingga masa kejatuhan Presiden Soeharto. Orde baru ini biasa disebut dengan Era Suharto. Orde baru lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa orde lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Awal masa orde baru keadaan politik dan keamanan negara masih kacau, karena peristiwa G-30S/PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta organisasi massanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili. Pada masa ini dibentuk kesatuan aksi berupa Front Pancasila yang selanjutnya lebih dikenal dengan Angkatan 66 untuk melawan tokoh yang terlibat dalam pemberontakan Gerakan 30 September 1965.

Aksi mahasiswa menuntut pembubaran PKI
Sumber: www.idsejarah.net

Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan kehidupan politik orde baru, yaitu menata politik dalam negeri dan menata politik luar negeri.

1. Politik Dalam Negeri Masa Orde Baru

Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan maka pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Soeharto mengambil kebijakan stabilitas politik dengan tujuan agar tidak terjadi gejolak politik yang dapat mengganggu jalannya pembangunan. Untuk itulah pemerintah orde baru melakukan penataan politik dalam negeri sebagai berikut.

a. Pembentukan Kabinet Pembangunan
Kabinet ini merupakan kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) yang disebut juga Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet ini memiliki tugas untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai

8. Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang pertama kali ditetapkan pada tahun ....
   a. 1946
   b. 1947
   c. 1948
   d. 1949
   e. 1950
9. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar. Hal tersebut di antaranya karena...
   a. Indonesia hanya mengandalkan berbagai jenis ekspor namun tidak bisa ekspor karena blokade laut Belanda, sehingga memukul perekonomian Indonesia.
   b. Indonesia hanya mengandalkan ekspor pertanian, perkebunan dan tambang tapi tidak ada armada laut yang memadai.
   c. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
   d. Indonesia belum mampu melakukan ekspor karena tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai.
   e. Indonesia belum mampu melakukan impor karena tidak memiliki modal yang memadai.
10. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi blokade ekonomi Belanda di antaranya ....
   a. diplomasi beras ke Mesir
   b. diplomasi beras ke Pakistan
   c. diplomasi beras ke Jepang
   d. diplomasi beras ke Burma
   e. diplomasi beras ke India

B. Soal Uraian

Jawablah secara rinci dan jelas!

1. Sebutkan dan jelaskan peran PPKI pada awal kemerdekaan Indonesia!
2. Sebutkan usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) kepada pemerintah!
3. Bagaimana ideologi bangsa Indonesia pada masa orde lama?
4. Bagaimana keadaan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal?
5. Bagaimana keadaan politik Indonesia pada masa orde baru?

UNIT 2 POLITIK EKONOMI ORDE BARU SAMPAI ERA REFORMASI

Gambar Pahlawan Revolusi
Sumber: http://www.beritainspiratif.com

Ingat gambar di atas? Ya, itu adalah foto para pahlawan revolusi yang gugur pada tahun 1965 sebagai korban pemberontakan G30S/PKI. Kekejaman PKI kala itu menggoreskan kisah pilu bagi rakyat Indonesia. Tidak hanya sepuluh jenderal itu saja yang menjadi tumbal revolusi, masih ada ribuan orang yang ikut menjadi korban kekejaman PKI.

Peristiwa G30S/PKI menjadi tonggak sejarah kelam bangsa Indonesia, sekaligus menandai pergantian era politik dari orde lama ke orde baru. Pasca peristiwa G30 S PKI situasi politik dan ekonomi menjadi tidak menentu, namun sejarah kemudian mencatat peralihan kekuasaan kepada pemerintah orde baru terjadi perubahan arah politik dan keadaan ekonomi. Walaupun pada akhirnya rezim orde baru juga tumbang dan beralih pada era reformasi.

Partai peserta Pemilu 1971
Sumber: google.com

1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti (kelompok partai politik Islam).
2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).
3) Golongan Karya (Golkar).

Disamping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah orde baru menetapkan pula konsep massa mengambang. Partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan sampai pedesaan. Sementara itu jalur parpol ke tubuh birokrasi juga terpotong dengan adanya ketentuan agar Pegawai Negeri Sipil menyalurkan suaranya ke Golkar (monoloyalitas).

e. Pemilihan Umum

Pemerintah orde baru dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Keberhasilan menyelenggarakan pemilu menimbulkan kesan demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Pada setiap Pemilu orde baru. Golkar yang selalu memperoleh kemenangan mayoritas sehingga mendominasi mayoritas suara di DPR dan MPR masih ditambah kekuatan Fraksi ABRI memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode pemilihan.

Partai peserta pemilu pada masa orde baru
Sumber: google.com

f. Dwi Fungsi ABRI

Dwi fungsi ABRI diartikan sebagai menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran pertahanan keamanan dan sosial. Tujuan dari dwi fungsi ABRI adalah guna menciptakan stabilitas politik. Peran ABRI ini dikenal dengan tentara

b. Pembekuan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Pembekuan hubungan diplomatik ini disebabkan karena pada masa pemberontakan G30S/PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kudeta. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

c. Normalisasi hubungan dengan beberapa negara

1) Pemulihan hubungan dengan Singapura

Sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia, Indonesia melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura. Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang disampaikan pada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Akhirnya, pemerintah Singapura pun menyampaikan nota jawaban kesediaan mengadakan hubungan diplomatik.

2) Pemulihan hubungan dengan Malaysia

Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakan perundingan di Bangkok pada 29 Mei – 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan

Perjanjian Bangkok, pemulihan hubungan Indonesia – Malaysia
Sumber: google.com

hubungan diplomatik. Berdasarkan Perjanjian Bangkok tersebut dinyatakan tindakan permusuhan antara kedua belah pihak dihentikan. Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta (Jakarta Accord). Kedua Negara akhirnya menempatkan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara.

persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera yang disebut Catur Karya. Kabinet Ampera bertugas untuk:

1) Memperbaiki kehidupan rakyat, terutama bidang sandang dan pangan.
2) Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu, yakni 5 Juli 1968.
3) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional.
4) Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Selanjutnya pada sidang MPRS tanggal 7 – 12 Maret 1967 menetapkan Soeharto sebagai pejabat Presiden. Setelah dilantik presiden, Soeharto membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Pancakrida, meliputi:

1) Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.
2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Tahap pertama.
3) Pelaksanaan Pemilihan Umum.
4) Pengikisan sisa-sisa Gerakan 30 September 1965 PKI.
5) Pembersihan aparatur negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.

b. Pembubaran PKI dan organisasi massanya

Soeharto sebagai pengemban amanat Supersemar dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan, melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Pembubaran PKI pada tanggal 5 Maret 1966 yang kemudian diperkuat dengan dikukuhkan oleh Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966.
2) Dikeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

c. Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang Menteri yang dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 PKI.

d. Penyederhanaan dan pengelompokan partai politik

Akhirnya pemilu dapat dilaksanakan pada tahun 1971 yang diikuti oleh 10 kontestan. Setelah Pemilu 1971 dilakukan penyederhanaan jumlah partai, penggabungan (fusi) sejumlah partai. Dengan demikian pelaksanaan kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi, tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuasaan sosial-politik, yaitu sebagai berikut:

e. Diumumkannya nama-nama menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN.
f. Membekukan MPR dan DPR.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan ekonomi mulai positif, hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Namun ada pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi. Hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Akibatnya mulai muncul rasa ketidakpercayaan terhadap Gus Dur. Berbagai tuntutan dari rakyat mulai memperburuk situasi keamanan negara.

3. Masa Kepemimpinan Megawati Sukarnoputri

Kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais, atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan kebijakannya yang kontroversial. Akhirnya Presiden Gus Dur dimakzulkan atau dilengserkan.

Megawati menggantikan Gus Dur
Sumber: google.com

Setelah Gus Dur lengser, jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarnoputri. Megawati menjadi presiden sedangkan Hamzah Haz diangkat menjadi wakil presiden. Megawati melanjutkan kepemimpinan hingga berakhirnya masa jabatan. Pada masa kepemimpinan Megawati untuk melaksanakan demokrasi secara langsung, maka ia menetapkan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2004 dipilih secara langsung oleh rakyat.

4. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Pemilu pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dilaksanakan 5 Juli 2004. Pilpres pertama diikuti oleh 5 pasangan. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan wakilnya Jusuf Kala, terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pilihan rakyat yang pertama.

a. Mengganti 5 paket Undang-undang, 3 diantaranya diubah agar demokratis.
b. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi.
c. Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers.
d. Jajak pendapat penentuan otoritas wilayah Timor Timur.
e. Memberikan abolisi (Hak kepala Negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana) kepada 18 tahanan dan narapidana politik.
f. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR, dari 75 orang menjadi 38 orang.
g. Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI.

Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi, diantarnya:

a. merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi.
b. merekonstruksi perekonomian nasional.
c. melikuidasi bank-bank bermasalah.
d. membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional
e. menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga dibawah Rp 10.000,-
f. mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.
g. mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Setelah pemilu 1999, yaitu pemilu I pada masa reformasi, MPR melakukan pemilihan presiden melalui voting. Gus Dur terpilih menjadi Presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya, dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri.

Gus Dur presiden I pada masa reformasi
Sumber: google.com

Pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik, di antaranya adalah:

a. Departemen Penerangan dibubarkan, karena dianggap mengganggu kebebasan pers.
b. Departemen Sosial dibubarkan, karena dianggap sebagai sarang korupsi.
c. Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999.
d. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun baru imlek.

pejuang dan pejuang tentara. ABRI dan Polri mendapat jatah kursi di MPR/DPR dan DPRD dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator.

g. Pemasyarakatan P4

Presiden Soeharto pada 12 April 1976 mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yaitu gagasan Eka Prasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam Sidang Umum tahun 1978 mengenai "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila" atau dikenal sebagai P4.

Soeharto mengajukan nama Eka Prasetia Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita bangsa, yaitu (1) takwa kepada Tuhan YME dan menghargai orang lain yang berlainan agama/kepercayaan; (2) mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang; (3) mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi; (4) demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah; (5) suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain.

2. Penataan Politik Luar Negeri

Pemerintah orde baru di samping membina stabilitas politik dalam negeri, juga mengadakan perubahan dalam politik luar negeri. Pembaruan politik luar negeri tersebut antara lain; Indonesia menjadi anggota PBB, normalisasi hubungan dengan Malaysia dan Singapura, dan membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak satu persatu.

a. Indonesia kembali menjadi anggota PBB

Atas desakan Komisi Bidang Pertahanan Keamanan dan Luar Negeri DPR GR, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan badan-badan internasional lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950-1964. Akhirnya Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota PBB pada 28 Desember 1966.

Kembalinya Indonesia mendapat sambutan baik dari sejumlah negara Asia bahkan dari pihak PBB sendiri. Hal ini dibuktikan dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

B. Politik Masa Reformasi

Reformasi adalah sebuah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada di suatu masa. Reformasi juga dapat diartikan sebagai sebuah gerakan yang menghendaki adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Perubahan yang diharapkan nantinya akan menuju ke arah yang lebih baik, yang diharapkan terjadi dalam segala aspek kehidupan meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, hukum dan budaya.

Reformasi lahir ketika negara ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek mulai dari kehidupan ekonomi, politik, hukum dan bahkan krisis kebutuhan pokok. Selain itu, yang lebih parah adalah adanya krisis kepercayaan dalam tubuh pemerintahan orde baru. Oleh karena itu, reformasi di Indonesia dilakukan supaya ada pergantian pemimpin, dalam hal ini Presiden Soeharto.

Demonstran Reformasi di Gedung DPR/MPR 1998
Sumber: https://cdn.era.id/

Reformasi di Indonesia berlangsung ketika kekuasaan orde baru mulai runtuh, yakni pada tahun 1998. Setelah Presiden Soeharto lengser, maka Indonesia memasuki babak baru dalam menjalani masa reformasi. Lantas bagaimana kondisi politik, sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa Reformasi?

1. Masa Pemerintahan B.J. Habibie

Setelah Presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada 20 Mei 1998 karena didemo oleh rakyat, diangkatlah BJ Habibie (semula wakil presiden) sebagai pengganti menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. BJ Habibie hanya menjabat sebentar, selama 1 tahun 5 bulan. Presiden BJ Habibie yang terkenal dengan kejeniusannya ini, pada saat itu dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim orde baru. Jadi, rakyat menuntut Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum.

BJ Habibie diangkat jadi Presiden
Sumber: https://cdn.era.id/

Pemerintahan Habibie membentuk kabinet reformasi pembangunan dan berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada akhir masa orde baru. Beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi pada era pemerintahan Habibie adalah:

d. Memperkuat Kerjasama Regional dan Internasional

Politik bebas aktif menjadi pandangan politik luar negeri Indonesia dalam membina hubungan kerjasama dengan luar negeri yang saling menguntungkan. Peran aktif Indonesia ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama Menteri Luar Negeri/Perdana Menteri Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mendatangani kesepakatan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 sebagai awal berdirinya ASEAN. Penerapan politik bebas aktif lainnya adalah aktif dalam Konferensi Tingkat Tinggi Nonblok (KTT Nonblok), berperan aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), serta aktif dalam misi perdamaian dunia dengan mengirimkan Pasukan Garuda ke luar negeri.

PENUGASAN 2.1

Analisis perkembangan politik bangsa Indonesia pada masa orde baru

- Tujuan yang diharapkan:

  Dengan melakukan analisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa orde baru, Anda mampu:

  1. Mengidentifikasi kebijakan politik masa orde baru.
  2. Menganalisis keberhasilan orde baru dalam menata kehidupan politik.
  3. membuat kesimpulan kebijakan politik masa orde baru
  4. Menyusun karya tulis sederhana hasil analisis kebijakan politik orde baru.

- Media yang dibutuhkan:

  Alat tulis, kertas

- Langkah-langkah:

  1. Baca kembali uraian perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada era orde baru pada uraian modul di atas. Jika diperlukan mencari sumber bacaan lainnya yang relevan untuk memperkaya khasanah.
  2. Buatlah analisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia masa orde baru dan diketik pada ukuran kertas kuarto diketik satu setengah spasi atau tulisan tangan pada kertas folio bergaris.
  3. Kumpulkan tugas rangkuman di akhir kegiatan pembelajaran modul ini.

c. Antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam bidang politik semakin tinggi, salah satunya dalam pembentukan partai-partai baru.
d. Adanya perbaikan dalam hak asasi manusia (HAM) yang sebelumnya banyak dilanggar pada masa orde baru.
e. Keadilan dalam masyarakat semakin terasa dan menyeluruh.
f. Otonomi daerah mulai diterapkan, hal ini dilakukan agar daerah memiliki kewenangan yang lebih terhadap daerahnya.

Sedangkan kekurangan bidang politik pasca Reformasi di Indonesia, meliputi:

a. Semakin banyaknya teroris di Indonesia, hal ini terjadi karena Indonesia terlalu terbuka terhadap dunia luar/luar negeri.
b. Banyaknya kerusuhan yang terjadi akibat adanya demonstrasi secara bebas.
c. Berkembangnya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)
d. Kebebasan pers yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan. Hal ini mengakibatkan banyaknya penebar kebencian di media sosial.
e. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan menggunakan HAM dalam membela diri, sehingga kejahatan semakin berkembang.

PENUGASAN 2.2

Analisis perkembangan politik bangsa Indonesia pada masa reformasi

- Tujuan yang diharapkan:

  Dengan melakukan analisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa reformasi, Anda mampu:
  1. Menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia era reformasi.
  2. Menyajikan dalam bentuk tulisan analisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia era reformasi.

- Media yang dibutuhkan:
  Alat tulis, kertas

- Langkah-langkah:
  1. Baca kembali uraian perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada era reformasi pada uraian modul di atas. Jika diperlukan mencari sumber bacaan lainnya yang relevan untuk memperkaya khasanah.
  2. Buatlah analisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia masa era reformasi dan diketik pada ukuran kertas kuarto diketik satu setengah spasi atau tulisan tangan pada kertas folio bergaris.
  3. Kumpulkan tugas rangkuman di akhir kegiatan pembelajaran modul ini.

C. Ekonomi Masa Orde Baru

Perekonomian Indonesia pada masa orde baru berkembang pesat, walaupun hal ini terjadi bersamaan dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang merajalela. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan selama masa orde baru yang mencakup berbagai bidang, seperti politik, ekonomi dan sosial budaya. Pada awal orde baru pemerintah mengambil beberapa kebijakan bidang ekonomi untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Pada tanggal 3 Oktober 1966 dikeluarkan kebijakan ekonomi oleh pemerintah, antara lain:

1. Menerapkan anggaran belanja berimbang (*balance budget*). Fungsinya adalah untuk mengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi.
2. Menerapkan kebijakan untuk mengekang proses ekspansi kredit bagi usaha-usaha sektor produktif, seperti sektor pangan, ekspor, prasarana, dan industri.
3. Menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar negeri (*rescheduling*), serta berusaha untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit luar negeri baru.
4. Menerapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia.

Untuk menarik investasi diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, disamping tahun itu juga menetapkan UU Nomor 3 Tahun 1967 tentang APBN. Sejalan dengan itu pemerintahan Soeharto juga menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi luar negeri, yaitu dengan melakukan permintaan pinjaman dari luar negeri.

Pada masa orde baru Indonesia juga tergabung ke dalam institusi ekonomi internasional, seperti; *International Bank for Rescontruction and Development* (IBRD), *International Monetary Fund* (IMF), *International Development Agency* (IDA) dan *Asian Development Bank* (ADB). Semua itu guna mendorong akselerasi pembangunan ekonomi negara Indonesia.

Memerhatikan tingkat inflasi yang tinggi dan ekonomi yang carut marut pada masa orde lama, maka pemerintah orde baru mengambil kebijakan Trilogi Pembangunan yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
2. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Selanjutnya pemerintah orde baru dalam melakukan pembangunan menggunakan perencanaan lima tahunan dengan berbasis pada Trilogi Pembangunan. Perencanaan lima tahunan tersebut disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Program Repelita dimulai dari April 1969 yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama lima tahun sekali.

Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden selama 2 periode, yaitu 2004 – 2009 dan 2009 – 2014. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kondisi politik Indonesia stabil tidak ada gejolak.

Peserta Pilpres 2004. (Sumber: google.com)

5. Masa Kepemimpinan Joko Widodo

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selesai menjabat 2 periode dan tidak bisa mencalonkan lagi, maka pilpres kembali ramai dengan calon-calonnya dari masing-masing partai. Namun pada pelaksanaannya, yang maju pilpres hanya dua pasangan yang diusung oleh partai-partai pendukungnya. Ada yang unik pada pasangan pilpres ini, yaitu calon wapres Jusuf Kala yang berpasangan dengan Joko Widodo. Jusuf Kala yang dulunya adalah ketua partai Golkar tetapi tidak didukung oleh partainya. Golkar justru mendukung lawannya, yaitu pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa.

Peserta Pilpres 2014 (Sumber: google.com)

Pilpres ke tiga dilaksanakan 9 Juli 2014. Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kala yang diusung 4 partai memenangkan pemilu, mengalahkan pasangan Prabowo – Hatta Rajasa yang diusung 6 partai. Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi, menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada periode yang kedua. Jokowi merupakan presiden yang dekat dengan rakyat. Sehingga setiap kunjungan, masyarakat berebut untuk minta bersalaman dan *foto selfie*.

Bagaimana kondisi politik Indonesia pasca reformasi 1998? Ada beberapa perubahan yang terjadi dalam bidang politik. Kondisi politik Indonesia berbeda dengan masa sebelumnya. Terdapat kelebihan meski ada kekurangan. Kelebihan sistem politik Indonesia pasca reformasi meliputi:

a. Rakyat bebas dalam mengemukan pendapat.
b. Tidak ada lagi kekerasan bagi orang yang mengkritik pemerintah.

a. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan unit Pengelola Aset Negara
b. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
c. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00.
d. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.
e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF.
f. Mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat.
g. Mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

2. Masa Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Pada pemerintahan Gus Dur laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0%. Tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga (SBI) juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil.

Akan tetapi, ketenangan tidak berlangsung lama. Presiden mengeluarkan keputusan kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Sikap presiden tersebut juga menimbulkan perseteruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang klimaksnya adalah dikeluarkannya peringatan resmi kepada Presiden lewat Memorandum I dan II. Dengan dikeluarkannya Memorandum II, Presiden terancam akan diturunkan dari jabatannya dengan usulan Sidang Istimewa MPR yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2001.

Selama pemerintahan reformasi, berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan SARA terus berlanjut, misalnya pemberontakan Aceh, konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan Tengah. Belum lagi demonstrasi buruh semakin gencar yang mencerminkan semakin tidak puasnya masyarakat terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri.

Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya kepada pemerintah Indonesia,

dengan rendahnya mutu sumber daya manusia, tingginya tingkat produksi di instansi-instansi pemerintah, dan kondisi instabilitas politik. Perekonomian Indonesia mengalami penurunan hingga mencapai 0% tahun 1998.

(Sumber: google.com)

Kemerosotan ekonomi Indonesia ternyata tidak ditanggapi oleh presiden Soeharto dengan membuat perbaikan dalam hal kebijakan ekonomi, tetapi justru dengan meminta bantuan dana International Monetary Fund (IMF). Pada 15 Januari 1988, Presiden Soeharto menandatangani 50 butir *letter of intent* (*LoI*) dengan direktur IMF Asia, Michael Camdessus, sebagai sebuah syarat untuk mendapatkan kucuran dana bantuan luar negeri tersebut.

Dengan merujuk pada batasan tingkat keberhasilan ekonomi suatu bangsa yang dikeluarkan oleh bank dunia, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia tahun 1997/1998 telah mengalami kehancuran. Dalam hal investasi dan peningkatan modal, Indonesia mengalami kemunduran yang tajam. Investor luar negeri beramai-ramai memindahkan modalnya ke negara lain karena tidak adanya stabilitas dan kredibilitas politik dalam negeri. Angka ekspor-impor Indonesia menurun drastis karena sektor usaha tidak dipercaya oleh perbankan Indonesia. Tingginya tingkat korupsi ditataran pemerintahan dan munculnya kasus kredit macet yang melanda bank-bank utama di Indonesia mengakibatkan pembayaran *letter of credit* (L/C) dari sektor-sektor usaha Indonesia tidak diterima di luar negri. Krisis ekonomi Indonesia di tahun 1997/1998 berujung pada munculnya krisis multidimensi, baik itu politik, sosial, maupun krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Puncak dari krisis tersebut terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut mundurnya Soeharto.

PENUGASAN 2.3

Analisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa orde baru

- Tujuan yang diharapkan:
  Dengan melakukan analisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa reformasi, Anda mampu:
  1. Menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia orde baru.
  2. Menyajikan analisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia orde baru.

- Media yang dibutuhkan:
  Alat tulis, kertas
- Langkah-Langkah:
  1. Baca kembali uraian perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada orde baru pada uraian modul di atas. Jika diperlukan mencari sumber bacaan lainnya yang relevan untuk memperkaya khasanah.
  2. Buatlah analisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia masa orde baru dan diketik pada ukuran kertas kuarto diketik satu setengah spasi atau tulisan tangan pada kertas folio bergaris.
  3. Kumpulkan tugas rangkuman di akhir kegiatan pembelajaran modul ini.

D. Ekonomi Masa Reformasi

Krisis Ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997 – 1998 merupakan sebuah efek domino dari krisis ekonomi Asia yang melanda berbagai negara seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia. Karena fundamen ekonomi yang lemah, Indonesia mengalami kesulitan dalam menata ulang perekonomiannya untuk keluar dari krisis.

Setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru, kemudian disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden BJ. Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi.

1. Masa Kepemimpinan B.J. Habibie

Pada awal pemerintahan reformasi, masyarakat umum, kalangan pengusaha dan investor, termasuk investor asing, menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam negeri warisan orde baru, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Habibie berhasil menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar meskipun masih berkisar antara Rp 10.000,00 – Rp 15.000,00. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6.500,00 per dolar AS. Nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.

Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Perlu dicatat bahwa pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia berada pada masa keemasannya. Perekonomian Indonesia tumbuh sangat baik. Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Strategi pembangunan ekonomi Susilo Bambang Yudhoyono yang berbunyi "*pro-poor, pro-job, dan pro growth*" (dan kemudian ditambahkan dengan *pro environment*) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun.

Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, Susilo Bambang Yudhoyono hadir dengan terobosan pembangunannya berupa Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.

PENUGASAN 2.4

Menyusun Kliping perjuangan menuju masa reformasi Indonesia

- Tujuan yang diharapkan:

  Dengan melakukan penyusunan kliping, Anda diharapkan mampu:

  1. Menemukan informasi tentang perjuangan masa reformasi Indonesia.
  2. Menyusun kliping perjuangan menuju masa reformasi Indonesia.
  3. Mengidentifikasi kondisi obyektif yang menyebabkan orde baru runtuh dan munculnya era reformasi.
  4. Membuat kesimpulan tentang perjuangan masa reformasi Indonesia.

- Media yang dibutuhkan:

  Alat tulis, kertas, koran/majalah, internet

- Langkah-Langkah:
  1. Carilah informasi tentang perjuangan masa reformasi Indonesia terkait aspek politik dan ekonomi.
  2. Kumpulkan informasi tersebut dan simpan dalam bentuk digital, kemudian susunlah menjadi sebuah kliping.
  3. Buatlah kesimpulan tentang perjuangan masa reformasi Indonesia, maksimal dua lembar halaman ukuran kertas kuarto diketik satu setengah spasi atau tulisan tangan pada kertas folio bergaris.
  4. Kumpulkan tugas rangkuman di akhir kegiatan pembelajaran modul ini.

Latihan Soal Unit 2

A. Pilihan Ganda

Kerjakan soal di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang paling benar.

1. Pada masa Orde Baru pemerintahan yang dijalankan menganut sistem ....
   a. desentralisasi
   b. sentralisasi
   c. otonomi daerah
   d. otonomi khusus
   e. otonomi luas
2. Maksud dari krisis kepercayaan adalah ....
   a. negara dilanda banyak kerusuhan
   b. timbulnya gerakan reformasi
   c. ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, DPR, dan MPR
   d. ketidakpuasan rakyat akan hasil pemilu
   e. terjadinya krisis politik

padahal roda perekonomian nasional saat ini sangat tergantung pada bantuan IMF. Selain itu, Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club (negara-negara donor) karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia dengan kondisi perekonomiannya yang semakin buruk dan defisit keuangan pemerintah yang terus membengkak, tidak mungkin mampu membayar kembali utangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo tahun 2002 mendatang. Bahkan, Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet.

Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak pernah surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid, menaikkan tingkat *country risk* Indonesia. Ditambah lagi dengan memburuknya hubungan antara pemerintah Indonesia dan IMF. Hal ini membuat pelaku-pelaku bisnis, termasuk investor asing, menjadi enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, kondisi perekonomian nasional pada masa pemerintahan reformasi cenderung lebih buruk daripada saat pemerintahan transisi. Bahkan, lembaga pemeringkat internasional *Moody's Investor Service* mengonfirmasikan bertambah buruknya *country risk* Indonesia.

Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, tidak mustahil tahun 2002 ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya, bahkan bisa kembali negatif. Pemerintah tidak menunjukkan kesungguhan (*political will*) untuk menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas.

Melemahnya perekonomian nasional dan tidak stabilnya nilai tukar rupiah sangat berdampak negatif yang bisa menghambat usaha pemulihan, bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis pertama. Dampak negatif ini disebabkan oleh dua hal, yaitu; 1) perekonomian Indonesia masih sangat tergantung pada impor, baik barang modal dan pembantu, komponen dan bahan baku, maupun barang-barang konsumsi, 2) utang luar negeri Indonesia sangat besar.

3. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan, sebagai kelanjutan dari era kepemimpinan Gus Dur, yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b. Kebijakan privatisasi BUMN, yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-

1. **Repelita I** (1 April 1969 – 31 Maret 1974), sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7% sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%.
   Namun, kebijakan pada masa Repelita I dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal tersebut memicu timbulnya peristiwa *Malapetaka Lima Belas Januari* yang dikenal dengan Malari.
2. **Repelita II** (1 April 1974 – 31 Maret 1979) menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
3. **Repelita III** (1 April 1979 – 31 Maret 1984) Pelita III menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan.
4. **Repelita IV** (1 April 1984 – 31 Maret 1989) menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
5. **Repelita V** (1 April 1989 – 31 Maret 1994) menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan menghasilkan mesin-mesin sendiri.
6. **Repelita VI** dimulai pada 1 April 1994, pembangunan berfokus pada pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan peningkatan sumber daya manusia. Repelita ini belum selesai saat Presiden Soeharto lengser.

(Sumber: google.com)

Perkembangan ekonomi Indonesia telah mengalami stagnansi sejak tahun 1990-an. Saat itu, sistem neoliberalisme menjadi norma pengaturan ekonomi dan politik dunia. Barang-barang produksi Indonesia menjadi tidak berdaya saing apabila dibandingkan dengan barang luar negeri yang secara bebas memasuki pasaran Indonesia. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank dunia. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah adanya peningkatan investasi dibidang pendidikan, yang ditandai dengan peningkatan sumber daya manusia, rendahnya tingkat korupsi yang ada di tataran pemerintahan, dan adanya stabilitas dan kredibilitas politik.

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh bank dunia itu semacam acuan bagian negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi, khususnya negara penerima bantuan luar negeri seperti Indonesia. Akan tetapi, pada krisis 1997, kondisi ekonomi Indonesia tidak merepresentasikan satupun kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh bank dunia tersebut. Hal yang terjadi di Indonesia justru terjadinya krisis moneter yang ditandai

Rangkuman

Perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih sangat memprihatinkan, karena belum memiliki kelengkapan negara, seperti DPR dan MPR. Munculnya banyak partai (multi partai) sangat berpengaruh pada stabilitas dan keamanan negara. Partai hanya mementingkan jabatan dan golongan. Maka pada masa orde lama sering terjadi pemberontakan.

Puncak kegaduhan orde lama terjadi ketika muncul pemberontakan G-30S/PKI yang terkenal keji. Bukti kekejian PKI adalah terbunuhnya pahlawan revolusi yang disiksa di Lubang Buaya. Akhirnya rakyat menuntut adanya pembubaran PKI.

Suharto mulai memperbaiki stabilitas nasional. Masa Suharto yang disebut Orde Baru berhasil menciptakan keamanan. Namun kebijakan-kebijakan Suharto lama-kelamaan juga tidak disenangi masyarakat. Akhirnya terjadi mosi tidak percaya dan melengserkan Suharto.

Masa setelah Suharto memasuki era reformasi. Mulai dipimpin oleh BJ. Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Pada era reformasi, keadaan politik berubah drastis. Munculnya partai-partai baru dan pemilihan presiden oleh rakyat secara langsung.

Kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sangat memprihatinkan, karena harus dipaksa untuk menggunakan mata uang Jepang dan Belanda yang saat itu terjadi inflasi. Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda sangat merugikan Indonesia.

Perbaikan ekonomi Indonesia mulai terasa pada masa orde baru, dimana kebijakan hutang luar negeri dan penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia. Tetapi keadaan tersebut tanpa disadari ternyata justru memperburuk ekonomi Indonesia, karena bangsa Indonesia tidak sanggup membayar hutang luar negeri. Akibatnya tahun 1997/1998 Indonesia mengalami krisis moneter.

Setelah masuk masa reformasi, ekonomi Indonesia mulai membaik. Bahkan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia sanggup menutup hutang luar negeri dan tidak mau mengikuti instruksi IMF untuk hutang lagi.

8. Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru berasal dari ....
   a. Ketua PBB
   b. MA
   c. mahasiswa dan kaum intelektual
   d. DPR
   e. kaum pemilik modal
9. Tuntutan reformasi membawa korban tertembaknya empat mahasiswa Trisakti pada tanggal...
   a. 10 Mei 1998
   b. 11 Mei 1998
   c. 12 Mei 1998
   d. 13 Mei 1998
   e. 14 Mei 1998
10. Dalam kehidupan politik, kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap pihak oposisi adalah....
    a. memberi keleluasaan mengontrol pemerintah
    b. oposisi ditekan dan dipersempit ruang geraknya
    c. oposisi diajak bersama-sama membuat kebijakan baru
    d. oposisi tidak diberi tempat sama sekali
    e. mempertahankan oposisi sebagai partner

B. Soal Uraian

Jawablah secara rinci dan jelas!

1. Bagaimana langkah Presiden Soeharto dalam melaksanakan pembangunan pada era orde baru?
2. Mengapa pada masa orde baru ekonomi bangsa Indonesia bisa terpuruk?
3. Apa prestasi Presiden BJ. Habibie dalam memperbaiki perekonomian Indonesia?
4. Langkah cepat apa yang diambil Presiden Megawati dalam mengatasi maslah ekonomi Indonesia?
5. Terobosan apa yang dilakukan Presiden Susilo Bambang dalam mengatasi ekonomi Indonesia?

Kunci Jawaban

LATIHAN SOAL UNIT 1

A. Kunci Jawaban Pilihan Ganda

NO	JAWABAN	NO	JAWABAN
1	B	6	B
2	B	7	B
3	D	8	A
4	A	9	C
5	C	10	E

B. Kunci Jawaban Soal Uraian

1. Peran PPKI pada awal kemerdekaan Indonesia:
   a. Melakukan sidang untuk menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil, membentuk Komite Nasional Indonesia
   b. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
   c. Menetapkan BKR sebagai Badan Keamanan Rakyat
2. Usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) kepada pemerintah adalah menolak partai tunggal dan membentuk partai-partai politik
3. Ideologi bangsa Indonesia pada masa orde lama terbagi dalam 3 kelompok, yaitu golongan yang bersifat nasionalisme, agamis, dan sosialis-komunis.
4. Keadaan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal ada banyak partai (multi partai) namun masing-masing hanya memikirkan kepentingan jabatan dan golongan, kurang memperhatikan kepentingan negara secara bersama.
5. Keadaan politik Indonesia pada masa orde baru hanya ada 3 partai, yaitu PPP, Golkar dan PDI, dengan mayoritas dikuasai Golkar yang menerapkan politik monoloyalitas.

3. Pembangunan masa Orde Baru perkembangan pesat, namun tidak membuat kesejahteraan rakyat meningkat. Hal ini disebabkan oleh ....
   a. tidak melakukan gerakan reformasi di seluruh bidang
   b. tidak menyadari pentingnya kemakmuran
   c. tidak mampu melaksanakan pemilu yang berasas luber
   d. tidak meratanya hasil pembangunan
   e. perekonomian tidak maju
4. Lembaga yang melaksanakan pemilu pada tahun 1997 adalah ....
   a. Lembaga Pemilihan Umum
   b. Departemen Dalam Negeri
   c. Departemen Luar Negeri
   d. Komisi Pemilihan Umum
   e. Panitia Pemilihan Indonesia
5. Mundurnya Presiden Soeharto membawa Habbie menggantikan menjadi presiden. Dasar yang digunakan dalam hal ini adalah ....
   a. keputusan presiden
   b. instruksi presiden
   c. ketetapan MPR
   d. pasal 18 UUD 1945
   e. pasal 8 UUD 1945
6. Berikut yang bukan menjadi sebab tuntutan masyarakat terhadap perubahan kebijakan politik, ekonomi, dan hukum adalah ....
   a. keberadaan partai politik dianggap tidak memenuhi aspirasi politik masyarakat
   b. kebijakan ekonomi telah menimbulkan ketimpangan ekonomi
   c. terjadinya monopoli terhadap kelompok tertentu
   d. sering terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh penguasa
   e. kebebasan pers untuk mengkritisi pemerintah dibuka seluas-luasnya
7. Parpol yang ikut dalam pemilu tahun 1999 sebanyak ....
   a. 28
   b. 38
   c. 48
   d. 58
   e. 68

kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Pada masa kepemimpinan Megawati direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan tujuan untuk memberantas korupsi. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahan Megawati tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.

4. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengurangi dampak kenaikan BBM, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sesuai harapan dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya *Indonesian Infrastructure Summit* pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Selain itu, pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan.

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu menyulitkan (berbelit-belit), sehingga menyebabkan kecilnya

Penilaian

PENILAIAN LATIHAN SOAL 1 DAN 2

1. Setiap jawaban benar pada soal pilihan ganda diberi skor 1, jawaban salah diberi skor 0.
   Skor maksimal 10, dan skor minimal 0.
2. Setiap jawaban benar pada soal uraian diberi skor maksimal 3, jika tidak dijawab diberi skor 0.
   Jumlah skor maksimal 15 dan skor minimal 0.
3. Nilai akhir latihan soal adalah:

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{(\text{Jumlah Skor Pilihan Ganda} + \text{Jumlah Skor Uraian})}{25} \text{ X } 100\%$$

RUBRIK PENILAIAN PENUGASAN 1 - 8

Penugasan 1.1: Kabinet Parlementer Awal Kemerdekaan

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Kelengkapan informasi				
2	Keruntutan tulisan				
3	Aspek bahasa yang baik dan benar				
Skor Perolehan					

Kriteria:

1. Kelengkapan informasi
   Skor 4, jika sangat memahami informasinya dengan benar
   Skor 3, jika memahami informasinya
   Skor 2, jika cukup memahami informasinya
   Skor 1, jika tidak memahami informasinya
2. Keruntutan tulisan
   Skor 4, jika keruntutan tulisan lengkap, benar dan tepat
   Skor 3, jika keruntutan tulisan lengkap, benar dan kurang tepat
   Skor 2, jika keruntutan tulisan kurang lengkap dan tidak tepat
   Skor 1, jika tulisan tidak runtut dan tidak benar

Kriteria:

1. Banyaknya materi kliping
   Skor 4, jika jumlah berita yang dikumpulkan 10 buah atau lebih
   Skor 3, jika jumlah berita yang dikumpulkan antara 7 – 9 buah
   Skor 2, jika jumlah berita yang dikumpulkan antara 4 – 6 buah
   Skor 1, jika jumlah berita yang dikumpulkan antara 1 – 3 buah
2. Isi materi/berita kliping
   Skor 4, jika materi berita benar dan tepat sesuai Pemilu 1955
   Skor 3, jika materi berita sesuai Pemilu 1955
   Skor 2, jika materi berita kurang sesuai dengan Pemilu 1955
   Skor 1, jika materi berita tidak sesuai Pemilu 1955
3. Aspek ulasan/tulisan
   Skor 4, jika sesuai informasi kliping, bahasa mudah dipahami, baik dan benar
   Skor 3, jika sesuai informasi kliping, dapat dipahami
   Skor 2, jika kurang sesuai informasi kliping, susah dipahami
   Skor 1, jika tidak sesuai informasi kliping, tidak dapat dipahami

Penugasan 1.4: Kegagalan Kebijakan Ekonomi Gerakan Benteng

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Kelengkapan informasi				
2	Keruntutan tulisan				
3	Aspek bahasa yang baik dan benar				
Skor Perolehan					

Kriteria:

1. Kelengkapan informasi
   Skor 4, jika sangat memahami informasinya dengan benar
   Skor 3, jika memahami informasinya
   Skor 2, jika cukup memahami informasinya
   Skor 1, jika tidak memahami informasinya
2. Keruntutan tulisan
   Skor 4, jika keruntutan tulisan lengkap, benar dan tepat
   Skor 3, jika keruntutan tulisan lengkap, benar dan kurang tepat
   Skor 2, jika keruntutan tulisan kurang lengkap dan tidak tepat
   Skor 1, jika tulisan tidak runtut dan tidak benar

3. Aspek Bahasa
   Skor 4, jika bahasa mudah dipahami, baik dan benar sesuai kaidah
   Skor 3, jika bahasa agak mudah dipahami dan sesuai kaidah
   Skor 2, jika bahasa kurang dapat dipahami dan kurang sesuai kaidah
   Skor 1, jika bahasa sangat sulit dipahami dan tidak sesuai kaidah

Penugasan 1.2: Kabinet Masa Demokrasi Liberal

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Kelengkapan informasi				
2	Keruntutan tulisan				
3	Aspek bahasa yang baik dan benar				
Skor Perolehan					

Kriteria:

1. Kelengkapan informasi
   Skor 4, jika sangat memahami informasinya dengan benar
   Skor 3, jika memahami informasinya
   Skor 2, jika cukup memahami informasinya
   Skor 1, jika tidak memahami informasinya

2. Keruntutan tulisan
   Skor 4, jika keruntutan tulisan lengkap, benar dan tepat
   Skor 3, jika keruntutan tulisan lengkap, benar dan kurang tepat
   Skor 2, jika keruntutan tulisan kurang lengkap dan tidak tepat
   Skor 1, jika tulisan tidak runtut dan tidak benar

3. Aspek Bahasa
   Skor 4, jika bahasa mudah dipahami, baik dan benar sesuai kaidah
   Skor 3, jika bahasa agak mudah dipahami dan sesuai kaidah
   Skor 2, jika bahasa kurang dapat dipahami dan kurang sesuai kaidah
   Skor 1, jika bahasa sangat sulit dipahami dan tidak sesuai kaidah

Penugasan 1.3: Kliping Pemilu 1955

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Banyaknya materi kliping				
2	Isi materi/berita kliping				
3	Aspek tulisan/ulasan kliping				
Skor Perolehan					

3. Aspek Bahasa
   Skor 4, jika bahasa mudah dipahami, baik dan benar sesuai kaidah
   Skor 3, jika bahasa agak mudah dipahami dan sesuai kaidah
   Skor 2, jika bahasa kurang dapat dipahami dan kurang sesuai kaidah
   Skor 1, jika bahasa sangat sulit dipahami dan tidak sesuai kaidah

Penugasan 2.4: Kliping Perjuangan Menuju Masa Reformasi

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Banyaknya materi kliping				
2	Isi materi/berita kliping				
3	Aspek tulisan/ulasan kliping				
Skor Perolehan					

Kriteria:

1. Banyaknya materi kliping
   Skor 4, jika jumlah berita yang dikumpulkan 10 buah atau lebih
   Skor 3, jika jumlah berita yang dikumpulkan antara 7 – 9 buah
   Skor 2, jika jumlah berita yang dikumpulkan antara 4 – 6 buah
   Skor 1, jika jumlah berita yang dikumpulkan antara 1 – 3 buah
2. Isi materi/berita kliping
   Skor 4, jika materi berita benar dan tepat sesuai Pemilu 1955
   Skor 3, jika materi berita sesuai Pemilu 1955
   Skor 2, jika materi berita kurang sesuai dengan Pemilu 1955
   Skor 1, jika materi berita tidak sesuai Pemilu 1955
3. Aspek ulasan/tulisan
   Skor 4, jika sesuai informasi kliping, bahasa mudah dipahami, baik dan benar
   Skor 3, jika sesuai informasi kliping, dapat dipahami
   Skor 2, jika kurang sesuai informasi kliping, susah dipahami
   Skor 1, jika tidak sesuai informasi kliping, tidak dapat dipahami

Nilai akhir Penugasan adalah:

- Nilai penugasan = Jumlah Skor penugasan / 12 X 100%
- NA penugasan = (Jumlah P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8) / 8

Nilai Akhir/Nilai Ketuntasan Modul:

- Nilai Akhir = {(N Latihan Soal 1 + N Latihan Soal 2) + NA Penugasan} / 3 X 100%

LATIHAN SOAL UNIT 2

A. Kunci Jawaban Pilihan Ganda

NO	JAWABAN	NO	JAWABAN
1	B	6	E
2	C	7	C
3	D	8	C
4	A	9	C
5	E	10	B

B. Kunci Jawaban Soal Uraian

1. Langkah Presiden Soeharto dalam melaksanakan pembangunan pada era orde baru, meliputi:

   a. Menata politik dalam negeri melalui stabilitas nasional

   b. Menata politik luar negeri yang bebas aktif

2. Pada masa orde baru ekonomi Indonesia terpuruk karena negara kita memiliki banyak kepada luar negeri dan tidak bisa membayar, terutama saat nilai tukar rupiah melemah.
3. Prestasi Presiden BJ. Habibie dalam memperbaiki perekonomian Indonesia, ia sanggup menaikkan nilai tukar rupiah, sehingga sanggup membayar hutang.
4. Langkah cepat apa yang diambil Presiden Megawati dalam mengatasi masalah ekonomi Indonesia adalah dengan menjual perusahaan-perusahaan untuk menutup kebutuhan keuangan negara.
5. Terobosan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang dalam mengatasi ekonomi Indonesia yaitu memperbaiki perekonomian dengan menutup hutang-hutang negara serta menolak pinjaman dari IMF.

Kriteria Pindah / Lulus Modul

Warga belajar dinyatakan tuntas dan dapat mempelajari modul berikutnya dengan ketentuan telah menyelesaikan tugas-tugas dan latihan dalam modul minimal mencapai nilai ketuntasan 75 %.

Jika penguasaan materi belum mencapai nilai ketuntasan 75 % jangan berkecil hati dan tetap semangat. Ulangi dengan membaca kembali uraian materi dalam modul, kemudian coba lagi untuk mengerjakan soal latihan khususnya pada soal dimana Anda mengalami kesulitan menjawabnya.

Selanjutnya Tutor akan melakukan penilaian berbasis modul untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini.

Kriteria:

1. Kelengkapan hasil analisis
   Skor 4, jika sangat memahami analisisnya dengan benar
   Skor 3, jika memahami analisisnya
   Skor 2, jika cukup memahami analisisnya
   Skor 1, jika tidak memahami analisisnya keruntutan tulisan
2. Keruntutan tulisan
   Skor 4, jika keruntutan tulisan lengkap, benar dan tepat
   Skor 3, jika keruntutan tulisan lengkap, benar dan kurang tepat
   Skor 2, jika keruntutan tulisan kurang lengkap dan tidak tepat
   Skor 1, jika tulisan tidak runtut dan tidak benar
3. Aspek Bahasa
   Skor 4, jika bahasa mudah dipahami, baik dan benar sesuai kaidah
   Skor 3, jika bahasa agak mudah dipahami dan sesuai kaidah
   Skor 2, jika bahasa kurang dapat dipahami dan kurang sesuai kaidah
   Skor 1, jika bahasa sangat sulit dipahami dan tidak sesuai kaidah

Penugasan 2.3: Ekonomi Pada Masa Orde Baru

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Kelengkapan analisis				
2	Keruntutan tulisan				
3	Aspek bahasa yang baik dan benar				
Skor Perolehan					

Kriteria:

1. Kelengkapan hasil analisis
   Skor 4, jika sangat memahami analisisnya dengan benar
   Skor 3, jika memahami analisisnya
   Skor 2, jika cukup memahami analisisnya
   Skor 1, jika tidak memahami analisisnya keruntutan tulisan
2. Keruntutan tulisan
   Skor 4, jika keruntutan tulisan lengkap, benar dan tepat
   Skor 3, jika keruntutan tulisan lengkap, benar dan kurang tepat
   Skor 2, jika keruntutan tulisan kurang lengkap dan tidak tepat
   Skor 1, jika tulisan tidak runtut dan tidak benar

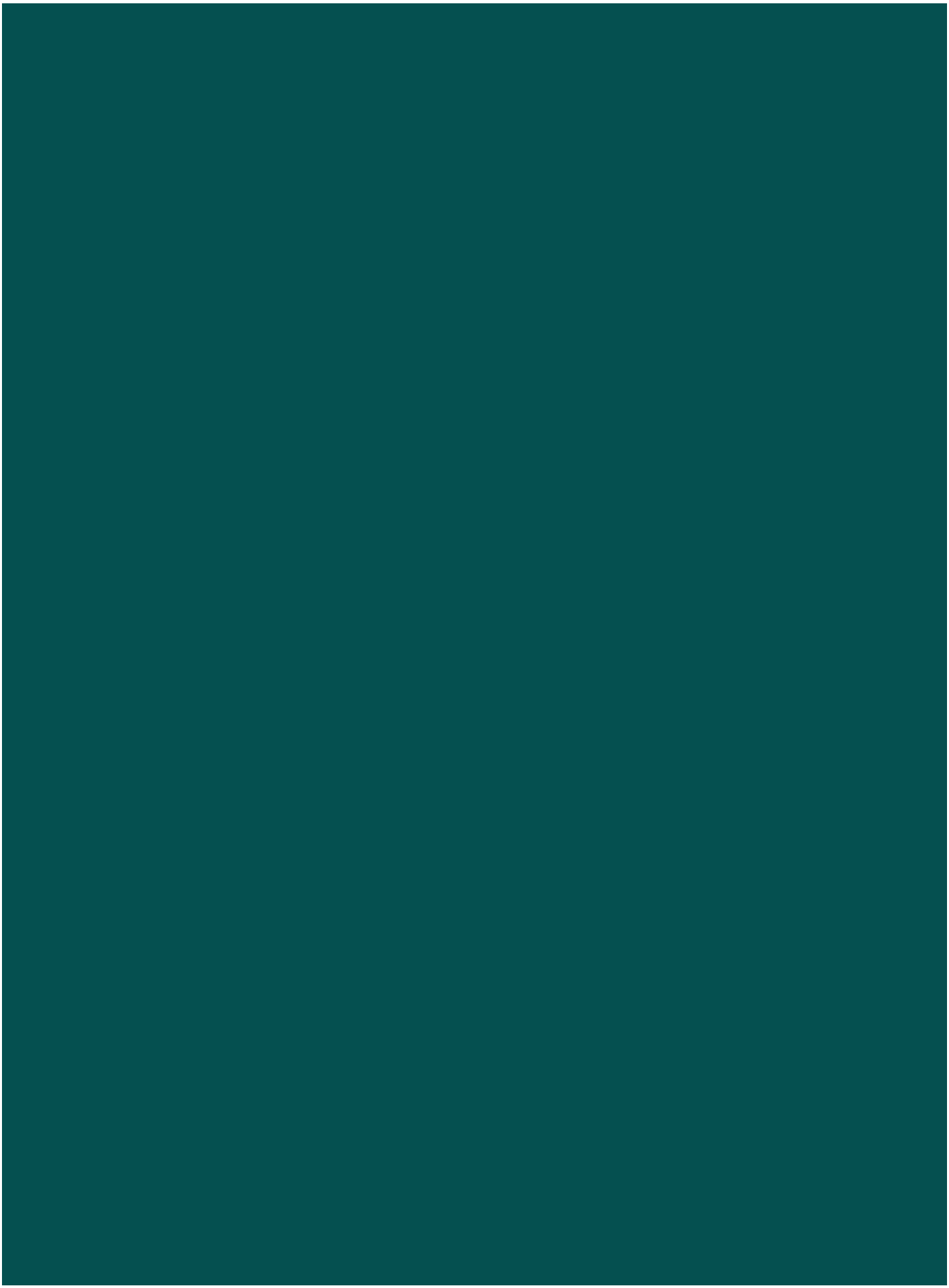

3. Aspek Bahasa
   Skor 4, jika bahasa mudah dipahami, baik dan benar sesuai kaidah
   Skor 3, jika bahasa agak mudah dipahami dan sesuai kaidah
   Skor 2, jika bahasa kurang dapat dipahami dan kurang sesuai kaidah
   Skor 1, jika bahasa sangat sulit dipahami dan tidak sesuai kaidah

Penugasan 2.1: Politik di Masa Orde Baru

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Kelengkapan analisis				
2	Keruntutan tulisan				
3	Aspek bahasa yang baik dan benar				
Skor Perolehan					

Kriteria:

1. Kelengkapan analisis
   Skor 4, jika sangat memahami analisisnya dengan benar
   Skor 3, jika memahami analisisnya
   Skor 2, jika cukup memahami analisisnya
   Skor 1, jika tidak memahami analisisnya

2. Keruntutan tulisan
   Skor 4, jika keruntutan tulisan lengkap, benar dan tepat
   Skor 3, jika keruntutan tulisan lengkap, benar dan kurang tepat
   Skor 2, jika keruntutan tulisan kurang lengkap dan tidak tepat
   Skor 1, jika tulisan tidak runtut dan tidak benar

3. Aspek Bahasa
   Skor 4, jika bahasa mudah dipahami, baik dan benar sesuai kaidah
   Skor 3, jika bahasa agak mudah dipahami dan sesuai kaidah
   Skor 2, jika bahasa kurang dapat dipahami dan kurang sesuai kaidah
   Skor 1, jika bahasa sangat sulit dipahami dan tidak sesuai kaidah

Penugasan 2.2: Politik Pada Masa Reformasi

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Kelengkapan analisis				
2	Keruntutan tulisan				
3	Aspek bahasa yang baik dan benar				
Skor Perolehan					

Daftar Pustaka

Budiarjo, Miriam. 1999. Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Fatoni, Uwes. 2006. Sejarah Sistem Politik Indonesia. Surabaya. Unitomo.

Feith, Herbert, "Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 ; Suatu Pengantar", dalam Miriam Budiardjo, 1998. Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta, Yayasan Obor.

Hartuti Purnaweni. 2004. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2, 2004. "Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa.

Irawan, Benny Bambang. 2007. Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 5 No.1 Oktober 2007 hal. 54-64 Fakultas UNTAG Hukum Semarang.

Kementerian Luar Negeri. 2004. Sejarah Diplomasi RI dari Masa ke Masa, Jakarta: Kemenlu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Sejarah Indonesia Kelas XII SMA. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Noer, Deliar. 1991. Mohammad Hatta: Biografi Politik. Jakarta: LP3ES

Notosusanto, Nugroho dan Ismail Saleh. 1989. Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/ PKI di Indonesia, Jakarta, Intermasa.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, MC. 2010. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta.

Sriyono, A. A. 2004. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Zaman yang Berubah.Dalam A. A. Sriyono, Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suasta, Putu. 2013. Menegakkan Demokrasi Mengawal Perubahan. Jakarta: Lestari Kiranatana.

Suryadinata, Leo. 1998. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES.

Wuryandari, G. 2008. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Website

https://materiips.com/perkembangan-awal-politik-pada-awal-kemerdekaan

https://www.kompasiana.com/yudhimaryoto/5b0d4f84cf01b43f3b0ceb22/mengenal-demokrasi-pada-awal-kemerdekaan-1945-1949

http://www.freedomsiana.com/2016/10/kehidupan-politik-pada-masa-demokrasi.html

https://mustaqimzone.wordpress.com/2009/11/21/indonesia-masa-demokrasi-terpimpin-1959-1966/

http://www.freedomsiana.com/2016/11/kehidupan-politik-bangsa-indonesia-pada.html

http://www.sumbersejarah.com/2017/09/kondisi-politik-sosial-dan-ekonomi-indonesia-pasca-reformasi.html

http://www.hariansejarah.id/2017/05/masa-demokrasi-liberal-indonesia-1950.html

TENTANG PENULIS

FAUZI EKO PRANYONO

Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Sorowajan Baru 1 Yogyakarta 55198
Web: http://www.fauziep.com email: fauziep@ymail.com

Nama lengkap Fauzi Eko Pranyono, dilahirkan di Magelang pada tanggal 8 April 1964. Tinggal di Margorejo Asri G-2 Sleman 55552. Agama Islam, status menikah. Nomor handphone 082134608522

Jabatan kedinasan sekarang adalah sebagai Pamong Belajar Madya pada Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerhati pendidikan nonformal dan aktif ngeblog di http://fauziep.com mengenai pendidikan nonformal, termasuk pendidikan masyarakat. Pada web tersebut diposting puluhan artikel seputar pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, pamong belajar, penilik, pendidikan anak usia dini, serta kursus dan pelatihan.

Di samping itu pada kurun waktu tahun 2012-2015 menjadi tim teknis Paket C pada Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Dikmen, dan pada tahun 2015-2018 tim teknis pendidikan kesetaraan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud. Tahun 2017 menjadi anggota tim ad hoc Badan Standar Nasional Pendidikan untuk penyusunan standar nasional pendidikan kesetaraan.

Saat ini menjadi redaktur pada Majalah Hamemayu yaitu majalah tentang pendidikan nonformal yang diterbitkan oleh Balai Pengembangan Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta DIY, serta penyunting web BP PAUD dan Dikmas DIY.

Riwayat Pekerjaan:

1991-1994	:	Pembantu Pimpinan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sewon Kabupaten Bantul
1995-1996	:	Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sewon Kabupaten Bantul
1996-1997	:	Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sleman Kabu paten Sleman
1997-2016	:	Pamong Belajar pada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY
2016-sekarang	:	Pamong Belajar pada Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 26 November 2018